

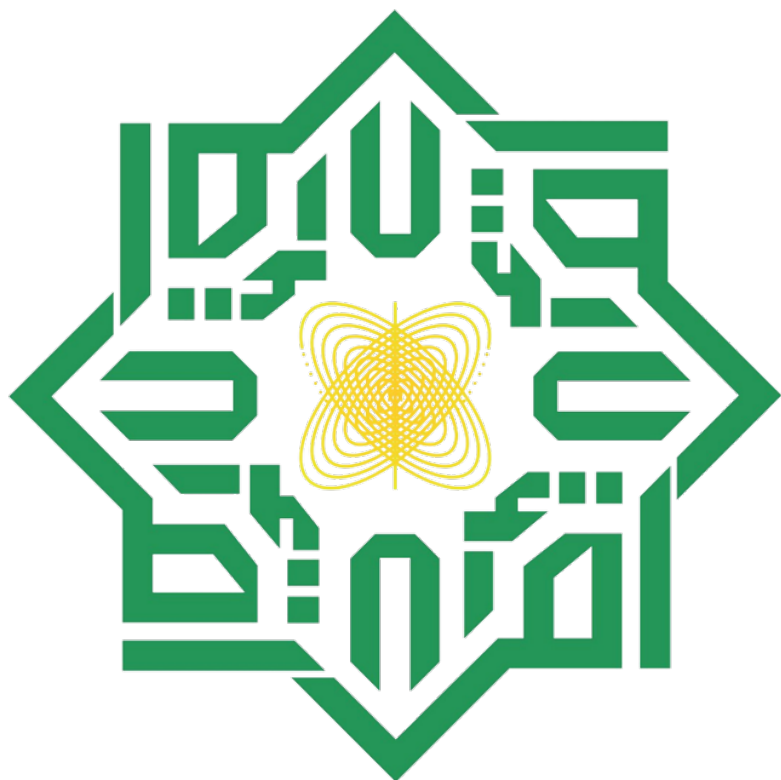
Dr. Zaitun, M. Ag
Dra. Hj. Ilmiati, M. Ag



Kapita Selekta Pendidikan Islam



Penerbit
BentengMedia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sultan Syarif Kasim
PEKANBARU – RIAU

Dr. Zaitun M. Ag.
Dra. Hj. Ilmiati, M. Ag

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM

Judul : **Kapita Selektta Pendidikan Islam**
Penulis : Dr. Zaitun, M. Ag., dan Dra. Hj. Ilmiati, M. Ag
Lay-out : Jonri Kasdi
Design Cover : Amri

ISBN : 978-602-70159-9-9
Cetakan Tahun 2014
iV, 138 hal. 140 x 200 mm

Alamat Penerbit :

BENTENG MEDIA

Jl. Garuda Sakti Komplek Jati Mandiri blok A No. 15
Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan Hak Eklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lingkup Hak Cipta

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan penjara paling lam 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

KATA PENGANTAR

Bi-ism Allah al-Rahman al-Rahim

Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul “Kapita Selekta Pendidikan Islam ”. Teruntuk Nabi Muhammad SAW, selaku penyelamat alam membawa dari kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan tidak henti-hentinya pujian selalu tercurah kepadanya.

Buku Kapita Selekta Pendidikan Islam membahas isu-isu penting tentang pendidikan islam. Pembahasannya dilakukan dengan pendekatan sosiologis antropologis. Harapan penulis semoga buku ini mampu membuka wawasan berfikir kritis mahasiswa dan pembaca umumnya serta manambah khazanah keilmuan, khususnya bagi calon tanaga pendidik dan kependidikan.

Dukungan dari berbagai pihak, terutama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sangat besar sehingga terbitnya buku ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Akhirnya, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 01 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii

Bab 1 : Pendidikan Inklusi

A. Gagasan pendidikan inklusi	1
B. Sistem Pendidikan anak luar biasa: Awal inklus...	2
C. Mamfaat Sekolah Inklusi	3
D. Lingkup Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusi	6
E. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusi	7

Bab 2 : Pendidikan Homeschooling

A. Latar Belakang Pendidikan Homescholing.....	11
B. Konsep Dasar Homescholing.....	12
C. Homeschoiling di Indonesia.....	13
D. Komunitas Sekolah Rumah Sebuah Model Pemenuhan Ha katas Pendidikan	15
E. Menimbang Sekolah Rumahan Pendidikan Formal Sebatas Alternatif	17
F. Homescholing sebagai Pilihan	19
G. Sekolah Rumah perlu Pengakuan Negara	21
H. Sekolah Rumah sebagai Perluasan Akses	21
I. Persekolahan d I Rumah Model Pendidikan Anak Merdeka	22
J. Peluang dan Tantangan.....	23
K. Pendidikan Alternatif danPerubahan Sosial	24

Bab 3 : Pergaulan Bebas Dikalangan Siswa

A. Pergaulan Muda Mudi	27
B. Pergaulan Bebas sebagai Fenomena Sosial	28
C. Maraknya Pergaulan Bebas	28
D. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas	31

E. Dampak Pergaulan Bebas bagi Masyarakat	33
F. Ciri-ciri Pergaulan Bebas.....	33
G. Cara Menanggulangi Pergaulan Bebas	34
H. Perubahan Kebudayaan dalam Pergaulan Bebas	35
I. Islam Memandang Pergaulan Bebas	36

Bab 4 : Drop Out

A. Peningkatan Angka Putus Sekolah	39
B. Pengertian Drop Out (Putus Sekolah)	40
C. Faktor-faktor Terjadinya Drop Out	41
D. Usaha Mengatasi Anak Drop Out	46
E. Program untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah dan Siswa Rawan Drop Out.....	48

Bab 5 : Pornografi dalam Berbagai Persepektif

A. Pornografi sebagai Penyakit Masyarakat	52
B. Pornografi Perspektif Etika, Moral, dan Akhlak	53
C. Dampak Pornografi Terhadap Prilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya.....	59
D. Upaya dalam Mengatasi Damapk Pornogafi	62

Bab 6 : Kiprah Perempuan dalam Pentas Pendidikan

A. Peranan Perempuan dalam Berbagai Perspektif.....	64
B. Sekilas Tentang Konsep gender	64
C. Peranan Perempuan dalam Dunia Pendidikan	66
D. Persoalan yang Terjadi dalam Dunia Pendidikan	67
E. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan	73
F. Wanita dalam Pandangan Islam	76

G. Upaya Penanggulan Dampak Negatif dari Bias Gender Pendidikan dalam Islam	80
 Bab 7 : Prilaku Bullying di Sekolah	
A. Pendahuluan.....	84
B. Kekerasan di Sekolah	84
C. Konsep Bullying.....	87
D. Bentuk-bentuk Bullying.....	89
E. Faktor Penyebab Munculnya Prilaku Bullying.....	92
F. Dampak bullying.....	94
G. Program Intervensi di Sekolah	95
H. Strategi Pencegahan dan Pengaggulangan Untuk Bullying	98
I. Penanganan Bullies dan Korban	113
 Bab 8 : Fakta Human Trafficking di Indonesia	
A. Pendahuluan.....	116
B. Konsep, Asal Usul dan Perkembangan Human Trafficking	117
a) Modus Operandi Trafficking	119
b) Kondisi Trafficking di Indonesia	120
c) Penanganan terhadap Prilaku Trafficking	121
 Daftar Pustaka	 134

BAB I

PENDIDIKAN INKLUSI: PELUANG DAN TANTANGAN

A. Gagasan Pendidikan Inklusi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dan masyarakat.

Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak *difabel* dengan anak-anak non-*difabel*. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok *difabel* menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat.

Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok *difabel*. Sementara kelompok *difabel* sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok *difabel* dalam menyuarkan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh *difabel* dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para tenaga pendidik.

B. Sistem Pendidikan Anak Luar Biasa: Awal Inklusi

1. Sistem pendidikan segregasi

Sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggara sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal.

Keuntungan sistem pendidikan segregasi:

- a. Rasa ketenangan pada anak luar biasa.
- b. Komunikasi yang mudah dan lancar.
- c. Metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak.
- d. Guru dengan latar pendidikan luar biasa.
- e. Mudah nya kerjasama dengan multidisipliner.
- f. Sarana dan prasarana yang sesuai.

Kelemahan sistem pendidikan segregasi:

- a. Sosialisasi terbatas
- b. Penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal

Bentuk-bentuk sistem pendidikan segregasi:

- a. Sekolah Luar Biasa
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa
- c. Kelas Jauh/Kelas Kunjung
- d. Sekolah Berasrama
- e. Hospital School

2. Sistem pendidikan sekolah integrasi

Sistem pendidikan bagi siswa luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa normal agar mengembangkan diri secara optimal.

Keuntungan sistem pendidikan integrasi:

- a. Merasa diakui kesamaan haknya dengan anak normal terutama dalam memperoleh pendidikan.
- b. Dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan secara optimal.
- c. Lebih banyak mengenal kehidupan orang normal.
- d. Mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- e. Harga diri anak luar biasa meningkat.
- f. Dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar.

C. Manfaat Sekolah Inklusi

Meski sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, namun dilihat dari sisi idealnya sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal baik bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terutama dari

aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu dan memiliki kepedulian. Disamping itu bukti lain yang ada mereka yang tanpa berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun.

Penyelenggara sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusi (*inclusive society*). Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 4 (1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang-undang tentang pendidikan inklusi dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusinya pun konon telah dilakukan.

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat. Pentingnya pendidikan inklusi, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan pendidikan dasar 9 tahun, akan tetapi lebih banyak keuntungannya tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak tetapi lebih penting lagi bagi kesejahteraan anak, karena pendidikan inklusi mulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung menjadi bagian dari keseluruhan, dengan demikian penyandang cacat akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab.

Inklusi terjadi pada semua lingkungan sosial anak, pada keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, dan institusi kemasyarakatan lainnya. Sebuah masyarakat yang

melaksanakan pendidikan inklusi berkeyakinan bahwa hidup dan belajar bersama adalah cara hidup (*way of life*) yang terbaik, menguntungkan semua orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespon setiap kebutuhan individu anak. Dengan demikian sekolah atau pendidikan menjadi suatu lingkungan belajar yang ramah anak-anak. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Disamping itu pendidikan inklusi juga melibatkan orang tua dalam cara yang berarti dalam berbagai kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, sedang dalam belajar mengajar, pendekatan guru berpusat pada anak.

Indonesia Menuju Pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (pasal 6 ayat 1). Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat). Disamping pendidikan atau sekolah reguler, pemerintah atau badan-badan swasta menyelenggarakan pendidikan atau sekolah khusus yang bisa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melayani beberapa jenis kecacatan. Tidak seperti sekolah reguler yang tersebar luas baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. SLB dan SDLB sebagian besar berlokasi di perkotaan dan sebagian kecil sekali yang berlokasi di pedesaan. Penyandang cacat anak untuk menjangkau SLB dan SDLB relatif sangat jauh hingga memakan biaya cukup tinggi yang tidak terjangkau penyandang cacat anak dari pedesaan. Ini pula masalah yang

dapat diselesaikan oleh pendidikan atau sekolah inklusi, di samping memecahkan masalah golongan penyandang cacat yang merata karena diskriminasi sosial, karena sejak dini tidak bersama, serta tidak berinteraksi dengan individu yang lain.

Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi daerah Khusus Ibukota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus.

D. Lingkup Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusi

Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap:

1. Alokasi waktu,
2. Isi/materi kurikulum,
3. Proses belajar-mengajar,
4. Sarana prasarana,
5. Lingkungan belajar dan,
6. Pengelolaan kelas.

Modifikasi/pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh Tim Pengembangan kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus (guru Pendidikan Luar Biasa) yang sudah berpengalaman mengajar di Sekolah Luar Biasa, dan ahli Pendidikan Luar Biasa (Orthopaedagog), yang dipimpin

oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi (Kepala SD Inklusi) dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan.

E. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum sekolah inklusi

1. Modifikasi Alokasi Waktu

Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Misalnya materi pelajaran (pokok bahasan) tertentu dalam kurikulum reguler (Kurikulum Sekolah Dasar) diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di atas normal (anak berbakat) dapat dimodifikasi menjadi 4 jam.

Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi relatif normal dapat dimodifikasi menjadi sekitar 8 jam; demikian juga untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di bawah normal (anak lamban belajar) dapat dimodifikasi menjadi 10 jam atau lebih; dan untuk anak tunagrahita menjadi 18 jam atau lebih dan seterusnya.

2. Modifikasi Isi/Materi

Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat digemukkan (diperluas/diperdalam) dan/atau ditambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler, tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi relatif normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan, atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit.

Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di bawah normal (anak lamban belajar/tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler

dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.

3. Modifikasi Proses Belajar-mengajar

Mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi, yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di atas normal. Menggunakan pendekatan *student centered*, yang menekankan perbedaan individual setiap anak; lebih terbuka (*divergent*). Memberikan kesempatan mobilitas tinggi, karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen, sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak kesana-kemari, dari satu kelompok ke kelompok lain.

Menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan pembelajaran kompetitif anak dirangsang untuk berprestasi setinggi mungkin dengan cara berkompetisi secara fair. Melalui kompetisi, anak akan berusaha seoptimal mungkin untuk berprestasi yang terbaik. Namun, dengan pendekatan pembelajaran kompetitif ini, ada dampak negatifnya, yaitu mungkin “ego-nya” akan berkembang kurang baik anak akan dapat menjadi egois.

Untuk menghindari hal ini, maka pendekatan pembelajaran kompetitif ini perlu diimbangi dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan pembelajaran kooperatif, setiap anak dikembangkan jiwa kerjasama dan kebersamaannya. Mereka diberi tugas dalam kelompok secara bersama mengerjakan tugas dan mendiskusikannya. Penekanannya adalah kerjasama dalam kelompok, dan kerjasama dalam kelompok ini yang dinilai. Dengan cara ini sosialisasi anak dan jiwa kerjasama serta saling tolong menolong akan berkembang dengan baik.

Dengan demikian, jiwa kompetisi dan jiwa kerjasama anak akan berkembang harmonis. Disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa (ada yang bertipe visual; ada yang bertipe auditoris; adapula yang bertipe kinestetis). Tipe

visual, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera penglihatan. Tipe auditoris, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera pendengaran. Tipe kinestetis, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera perabaan/gerakan. Guru hendaknya tidak monoton dalam mengajar sehingga hanya akan menguntungkan anak yang memiliki tipe belajar tertentu saja.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi melalui sekolah inklusi ditemukan berbagai kendala dan kelemahan diantaranya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*). Sehingga seperti program pendidikan inklusi hanya terkesan progameksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang *difabel*. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa *difabel* dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa *difabel*.

Jika pemerintah memang serius dalam melaksanakan program pendidikan inklusi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan inklusi secara konsisten mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para guru untuk

mewujudkan pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan (*cooperative learning*). *Cooperative learning* akan mengajarkan para siswa untuk dapat saling memahami (*mutual understanding*) kekurangan masing-masing temannya dan peduli (*care*) terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian maka sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan (*competitive learning*) yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan *competitive learning* dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Pada akhirnya suasana belajar *cooperative* ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial para siswa.

BAB II

PENDIDIKAN HOMESCHOOLING: PENDIDIKAN ALTERNATIF

A. Latar Belakang Pendidikan Homeschooling

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dan setiap anak sedapat mungkin memperoleh pendidikan yang layak bagi diri mereka. Namun, dalam pengalaman di lapangan menunjukkan bahwasannya banyak anak yang mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan selama bersekolah. Sebut saja *bullying*, pembentakan, kekerasan dari guru bahkan pemasangan kreativitas anak. Pengalaman-pengalaman yang kurang berkenan tersebut menimbulkan phobia terhadap sekolah bagi anak dan orang tua.

Kemudian, upaya penyeragaman kemampuan dan keterampilan semua anak untuk seluruh bidang turut mematikan minat dan bakat anak yang tentunya yang berbeda-beda. Karena setiap anak adalah unik. Lebih jauh lagi, kurikulum yang terlalu padat dan tugas-tugas rumah (PR) yang menumpuk membuat kegiatan belajar menjadi beban bagi sebagian anak.

Melihat kondisi ini, maka perlu dicarikan solusi alternatif bagi anak-anak yang kurang cocok dengan sistem pendidikan formal, salah satu bentuknya adalah *homeschooling*. Berdasarkan hal inilah pemerintah akhirnya menyelenggarakan pendidikan *homeschooling* di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Direktorat kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Menjamurnya lembaga-lembaga penyelenggara *homeschooling* seakan menyiratkan bahwa pendidikan

tersebut memang mendapatkan tempat di hati masyarakat sebagai pendidikan alternatif.

B. Konsep Dasar Homeschooling

HOMESCHOOLING sebuah sistem pendidikan atau pembelajaran yang diselenggarakan di rumah, kini sedang ramai dibicarakan orang. Sejumlah media massa, elektronik maupun cetak, juga ikut mempopulerkan sistem pendidikan alternatif yang bertumpu pada suasana keluarga ini. Persekolahan di rumah ini semakin menjadi perhatian dalam dua tahun terakhir, antara lain sejak begitu banyaknya orang tua merasakan suasana pembelajaran terbaik bagi anak. Akhirnya banyak anak yang stress dan kehilangan kreativitas alamiahnya.

Melihat gambaran di atas, mulai berkembang berbagai gagasan dari para pendidik, bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan anak. Lalu munculah berbagai sekolah alternatif, misalnya sekolah alam, yang mengajarkan siswanya lebih banyak belajar di alam. Anak tidak terlalu banyak belajar dalam ruangan serba kaku dan tertutup, namun lebih banyak berada di alam bebas.

Adapula sekolah alternatif lain yang membebaskan anak untuk belajar apa saja sesuai dengan minatnya. Di sini tidak ada kelas seperti kelas formal. Fungsi guru lebih banyak pada membimbing dan mengarahkan minat anak dalam mata pelajaran yang disukainya. Masih banyak sekolah alternatif lain yang memiliki metode pembelajaran masing-masing. Intinya anak dijadikan sebagai objek kurikulum bukan subjek. Atau dengan kata lain kurikulum dan sekolah adalah untuk anak, bukan sebaliknya, anak untuk sekolah atau kurikulum.

Dari berbagai alternatif di atas munculah kemudian *homeschooling* alias persekolahan rumah. Secara etimologis *homeschooling* adalah sekolah yang diadakan di rumah, namun secara hakiki adalah sebuah sekolah alternatif yang menempatkan anak sebagai subjek dengan pendekatan pendidikan *at home*. Dengan pendekatan ini anak merasa

nyaman, mereka belajar sesuai dengan keinginan dan gaya belajar masing-masing; kapan saja dan di mana saja, sebagaimana berada di rumah sendiri.

Di *Homeschooling* anak tidak terus-menerus belajar di rumah, namun bisa di mana saja dan kapan saja asalkan kondisinya betul-betul menyenangkan dan nyaman seperti suasana di rumah. Maka, jam belajarnya pun sangat lentur, yaitu dari mulai bangun tidur sampai berangkat tidur kembali.

Di banyak negara maju, konsep persekolahan di rumah ini sudah mulai dikembangkan. Di Amerika Serikat misalnya, sudah banyak disusun kurikulum untuk persekolahan di rumah agar sistem pendidikannya memiliki konsep dan visi yang jelas.

C. Homeschooling di Indonesia

Sebenarnya sudah lama bangsa kita mengenal konsep *homeschooling* ini, bahkan sebelum sistem pendidikan barat datang. Tengok saja di pesantren-pesantren misalnya, para kiai, buya dan tuan guru khusus mendidik anak-anaknya sendiri. Begitu pula pada pendekar, bangsawan atau seniman tempo dulu. Mereka mendidik secara pribadi di rumah atau padepokan masing-masing daripada sekedar mempercayakannya pada orang lain.

Tak kurang para tokoh besar seperti KH Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, atau Buya Hamka juga mengembangkan cara belajar dengan sistem persekolahan di rumah ini, bukan sekedar lulus ujian kemudian memperoleh ijazah, namun agar lebih mencintai dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Saat ini sistem persekolahan di rumah juga bisa dikembangkan untuk mendukung program pendidikan kesetaraan. Khususnya terhadap anak bermasalah, seperti anak jalanan, buruh anak, suku terasing, sampai anak yang memiliki keunggulan seperti atlet, artis cilik yang padat dengan kegiatan mereka.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dalam pasal 27 ayat (1) dikatakan: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Lalu pada ayat (2) dikatakan bahwa: hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi, secara hukum kegiatan persekolahan di rumah dilindungi oleh Undang-Undang.

Klasifikasi bentuk persekolahan di rumah ditandai ada tiga macam, yaitu tunggal, majemuk, dan komunitas. Persekolahan di rumah dengan bentuk tunggal apabila diselenggarakan oleh sebuah keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lain. Dikategorikan majemuk apabila dilaksanakan berkelompok oleh beberapa keluarga. Adapun disebut komunitas bila persekolahan di rumah itu merupakan gabungan beberapa model majemuk dengan kurikulum yang lebih berstruktur sebagaimana pendidikan informal. Oleh karena itu, persekolahan rumah dapat didaftarkan ke Dinas Pendidikan setempat sebagai komunitas pendidikan nonformal. Pesertanya kemudian dapat mengikuti ujian nasional setara paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA).

Ada beberapa tantangan bagi penyelenggara persekolahan di rumah, yaitu: (1) sulitnya memperoleh dukungan atau tempat bertanya; (2) kurangnya tempat sosialisasi dan orang tua harus terampil memfasilitasi proses pembelajaran; (3) evaluasi dan penyetaraannya. Namun dengan adanya Asosiasi Sekolah-rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah-Pena) untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan persekolahan di rumah dan pendidikan alternatif di Indonesia, termasuk memberikan pelatihan dan informasi mengenai cara penyelenggaraannya, diharapkan kendala di atas dapat diatasi.

Adapun kekuatan persekolahan di rumah lebih memberikan kemandirian dan kreativitas bagi anak, peluang untuk mencapai kompetensi individu secara maksimal, terlindungi dari penyakit sosial seperti narkoba, konsumerisme, pergaulan menyimpang dan tawuran, serta memungkinkan anak siap menghadapi kehidupan nyata dengan lingkup pergaulan yang lebih luas. Semakin memperkuat keyakinan bahwa model persekolahan di rumah alias *homeschooling* merupakan salah satu alternatif pendidikan di masa yang akan datang, serta mempercepat tercapainya masyarakat belajar yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani.

D. Komunitas Sekolah Rumah Sebuah Model Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Sejatinya pemenuhan hak atas pendidikan menjadi komitmen pemerintah. Demikian juga dengan upaya penyatuan berbagai komitmen global untuk mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*). Kerangka Kerja Aksi Dakar mempertegas bahwa pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menekankan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berbasis HAM yang diimplementasikan untuk semua pada lingkup negara.

Bagi anak, mengembangkan potensi melestarikan pengetahuan, penguasaan, dan kebajikan dengan pengalaman belajar yang menyenangkan dalam bimbingan pendidik terbaik. Homeschooling atau sekolah rumah tidak menuntut orang tua menjadi guru layaknya guru dalam ruang kelas. Cukup dengan mendorong anak untuk menumbuhkan pengalaman belajar dalam balutan cinta, kasih sayang, dan kehangatan keluarga. Keberhasilan sekolah rumah sebenarnya sudah dimulai sejak orang tua menyadari bahwa tiap anak adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah SWT.

Pengajaran agama harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia

dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima, serta rasa persahabatan di antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, atau golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian.

Dalam konteks ini, komunitas sekolah rumah menjadi model pendidikan kesetaraan yang diakui pemerintah ditantang untuk bisa menjamin perlindungan anak agar tidak menyalahi prinsip penyelenggaraan yang diamanatkan UU Sisdiknas maupun praktik indoktrinisasi yang mengarah pada fanatisme. Penyelenggara sekolah rumah yang tidak perlu berlelah-lelah dengan batasan kurikulum sebuah sebuah kelas yang disibukkan oleh 24 anak, bahkan lebih. Ketika hambatan terhadap penghargaan ditiadakan, minat dan kemampuan anak terus digali serta tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, maka budaya belajar jadi niscaya.

Menghadirkan fasilitator yang berpengalaman dalam mengimplementasikan pendidikan anak merdeka dalam forum (obrolan keluarga) ternyata dapat memperkuat komunitas sekolah rumah. Setiap keluarga penyelenggara sekolah rumah dapat berbagi pengalaman belajar sambil mendiskusikan perkembangan anak-anak dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Bahkan kini sudah ada asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif yang diharapkan dapat menjadi amanah bagi komunitas sekolah rumah dan pendidikan alternatif di Indonesia.

Seluruhnya menjadi modal belajar yang sangat berarti bagi komunitas sekolah rumah. Apalagi jika komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi pemenuhan atas hak pendidikan berkualitas dan bebas biaya tidak hanya bagi pelaksana sekolah rumah dan pendidikan alternatif segera direalisasikan.

E. Menimbang Sekolah Rumahan Pendidikan Formal Sebatas Alternatif

Kecenderungan untuk menerapkan sistem belajar *homeschooling* ini diakibatkan oleh adanya rasa ketidakpercayaan kepala sekolah formal karena kurikulumnya terus berubah dan memberatkan anak, menganggap anak sebagai objek bukan subjek, memasung kreativitas dan kecerdasan anak, baik dari segi emosional, moral maupun spiritual. Sebenarnya, secara operasional, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengakui sistem sekolah rumahan, tetapi pemerintah masih belum melakukan standarisasi terhadap sistem belajar ini.

Tanpa menafikan peran sekolah formal dalam usaha memperbaiki kualitas pendidikan bangsa Indonesia, melalui tulisan ini, penulis ingin berbagi cerita mengenai sisi-sisi positif dari sekolah rumahan sebagai upaya alternatif bagi proses perbaikan kualitas pendidikan bangsa ini. Belajar bersama di rumah, ada beberapa hal yang bisa dipetik.

Pertama, belajar di rumah lebih menyenangkan; jumlah mata pelajaran yang dibebankan kepada peserta didik di sekolah formal saat ini sangatlah memberatkan, ketika merasa terbebani untuk mempelajari suatu bidang studi, bukan rasa ingin tahu yang muncul dalam benak mereka, melainkan setumpuk beban pengetahuan yang harus ia jejakkan ke dalam otak.

Dengan beban seperti ini, mereka akan enggan dan ogah-ogahan untuk membaca dan mengembangkan pengetahuannya sendiri, apalagi misalnya di sekolah mereka lebih banyak menerima pengetahuan dengan proses satu arah (*spoon feeding*). Naifnya, ketika peserta didik tidak mampu menyerap pelajaran di ruang kelas, mereka diajak untuk belajar lagi di luar kelas, misalnya dengan mengikuti les, pelajaran tambahan, ataupun bimbingan belajar, padahal bidang studi yang mereka pelajari sama dengan yang mereka pelajari di ruang kelas. Sistem belajar seperti ini tidak hanya

menambah beban bagi mereka, tetapi juga akan membuat mereka merasa jemu dan bosan karena ada proses pengulangan (repetisi) bahan pelajaran.

Namun dengan sistem belajar *homeschooling*, mereka akan belajar lebih menyenangkan karena menerima pelajaran dengan rasa ingin tahu dan tidak ada beban untuk mempelajarinya. Hal ini penting untuk proses berpikir mereka kedepan karena akan terus mengembangkan pengetahuannya tanpa harus dibatasi oleh ruang (jenjang pendidikan) dan waktu (sepanjang hayat).

Dengan demikian, mereka akan mempunyai kebebasan berpikir dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka kenali dan tekuni.

Kedua, belajar di rumah akan mendukung terhadap terciptannya lingkungan yang lebih komunikatif antara anggota keluarga. Di tengah kecenderungan merenggangnya rasa kekerabatan dan kekeluargaan, terutama di daerah urban, menyediakan ruang belajar terbuka di rumah akan kembali menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan. Selain ini, mereka juga akan belajar lebih kooperatif, tak hanya mementingkan keberadaan dan prestasinya sendiri, tetapi dengan sendirinya akan membantu kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudaranya.

Hal ini berbeda dengan target pencapaiannya selama ini yang dikembangkan di sekolah formal yang hanya mementingkan nilai, sehingga tidak jarang para siswa akan berusaha mempertaruhkan apapun untuk memperoleh nilai yang tinggi dengan cara curang, menyontek misalnya cara belajar seperti ini justru akan menghambat cara berpikir positif dan cara menghadapi masa depan kehidupannya; mereka akan cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan hidup.

Ketiga, belajar di rumah akan mendukung terhadap kematangan jiwa anak. Hampir seluruh perkembangan jiwa anak bisa tercover karena lebih gampang terpantau dan terkomunikasikan dengan pihak orang tua. Jadi hambatan

belajar mereka baik secara fisik maupun psikis, relatif lebih cepat diketahui dan dipecahkan. Proses kematangan jiwa ini sangatlah membantu terhadap rasa kepercayaan diri untuk selalu belajar dan berjuang demi kemajuan diri dan bangsanya.

Keempat, megajak akan-anak untuk tidak hanya berkutat dengan buku-buku, misalnya mereka diajak belajar di alam terbuka seperti di daerah persawahan, sungai ataupun hutan, dalam artian apa yang mereka baca dan pelajari coba disinggungkan dan didiskusikan dengan keadaan sekitar.

F. Homeschooling sebagai Pilihan

Peran orang tua sebagai partner dan fasilitator anak dalam proses belajar menjadi kunci utama bagi keberhasilan *homeschooling*. Sebagian orang tua yang merasakan masa awal *homeschooling* menyita perhatian dan perasaan lebih matang dibanding dengan pendidikan formal. Ketika orang tua memilih untuk menjadi pembimbing anak anda dalam homeschooling, sifat-sifat dasar berikut ini menjadi perhatian:

1. Sabar

Kadang-kadang orang tua bisa merasa bosan dan kelelahan karena menjadi pemantau anak terus-menerus. Namun kebosanan dan kelelahan ini bisa dibatasi dengan bertemu dengan orang tua lain yang juga melakukan *homeschooling*. Ikatan emosional dan saling berbagi di dalam sebuah komunitas bisa menggiatkan satu sama lain. Masalah-masalah yang muncul bisa dicarikan solusi bersama. Berbagi dengan orang tua yang lain atau sebuah komunitas bisa menguatkan kesabaran orang tua yang mempraktekkan *homeschooling*. Kesabaran adalah modal utama untuk mendampingi anak belajar di rumah. Tanpa kesabaran orang tua, anak justru akan menjadi korban bagi ego dan pribadi.

2. Mau mendengar dan bernegosiasi
Apapun keinginan anak, anda harus memberikan peluang untuk berbicara. Setelah dia mengemukakan keinginannya, barulah anda menawarkan pilihan-pilihan. Memberi pilihan adalah merupakan tahapan penting dalam upaya membentuk kepribadian yang bertanggung jawab.
3. Mau berubah, fleksibel dan tanggap
4. Memahami kebutuhan dan keinginan anak
Memahami berada satu tingkat di atas mengetahui. Ketika anda mengatakan “paham” berarti anda melibatkan emosi dan konsentrasi yang lebih jika dibandingkan anda mengatakan “tahu”. Memahami kebutuhan dan keinginan anak pun menuntut keahlian dan kecermatan anda.
5. Mengetahui kemampuan dan ketertarikan anak
Jika anda sudah yakin kemana anak anda mengarahkan ketertarikan terbesarnya, anda bisa sedikit demi sedikit mendampingi anak anda mewujudkan mimpi terbesarnya.
6. Kreatif
Ketika wacana *homeschooling* di identikkan dengan biaya mahal, kreatifitas anda bisa menjadi tongkat ajaib yang mengubahnya. Ketika anda bersikap kreatif, kegiatan-kegiatan murah meriah menggantikan agenda-agenda dengan biaya mahal. Semua bergantung pada kreativitas anda.

Sebagai lembaga pendidikan alternatif, persekolahan di rumah alias *homeschooling* bakal memperoleh bantuan operasional sekolah. Jika selama ini sekolah formal mendapatkan bantuan operasional sekolah atau BOS, maka lembaga alternatif bakal mendapatkan biaya operasional penyelenggara BOP.

G. Sekolah Rumah Perlu Pengakuan Negara

Menjamurnya pendidikan rumah belakangan ini termasuk persekolahan di rumah alias *homeschooling* perlu dipandang sebagai partisipasi masyarakat dalam perluasan akses pendidikan. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam model pendidikan seperti itu, mestinya pemerintah pun menyediakan bantuan biaya seperti halnya untuk jalur formal (persekolahan) dan nonformal (luar sekolah). Konkritnya selain diberi kesempatan untuk ikut ujian kesetaraan paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA), para peserta didik persekolahan di rumah juga harus dihitung sebagai warga negara yang berhak mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.

H. Sekolah Rumah Sebagai Perluasan Akses

Guna memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah serta demi menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada anak, para pemangku kepentingan pendidikan alternatif, termasuk sekolah rumahan (*homeschooling*), meminta pemerintah mengakui kegiatan mereka.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, tuntutan pengakuan yang dimaksud terutama tentang kesetaraan jenjang dan bobot akademis antara pendidikan alternatif dengan pendidikan regular.

Tuntutan tersebut mengemukakan dalam deklarasi pembentukan Asosiasi *Homeschooling* dan Pendidikan Alternatif Indonesia di Jakarta, Seto Mulyadi memimpin deklarasi tersebut menegaskan perlunya pendidikan alternatif dikembangkan sebagai jawaban atas kentanya pengeangan terhadap hak tumbuh anak secara wajar di sekolah regular.

I. Persekolahan di Rumah Model Pendidikan Anak Merdeka

Memelihara kemerdekaan anak dan mengasuh mereka berjiwa mandiri, tantangan tersulit pendidik. Hampir seluruh anak Indonesia tumbuh dengan rutinitas tanpa gaya kejut, dengan menu wajib berupa tumpukan tugas bernama pekerjaan sekolah, dilengkapi ketentuan seragam, buku paket wajib dan lulus ujian nasional.

Akibatnya, kreatifitas berpikir anak Indonesia pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata berpikir anak-anak di Negara-negara tetangga sekalipun. Kebijakan ujian nasional yang kontroversial sebagai penentu kelulusan dan penyelenggara kelas Internasional, kelas akselerasi, kelas unggulan di sekolah-sekolah negeri yang difavoritkan masyarakat, menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Mengejar ketertinggalan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang diskriminatif ini apalagi dengan biaya selangit yang dibebankan kepada orang tua siswa adalah tindakan yang salah.

Seharusnya pemerintah menjamin pelayanan pendidikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 4 bahwa (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna; (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Bagi anak, belajar sesungguhnya didorong oleh motif rasa ingin tahu. Peran pendidik adalah bagaimana menumbuhkan keingintahuan anak dan mengarahkan dengan cara yang paling mereka harapkan, dan paling mereka minati. Jika anak diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, ia akan tumbuh dengan rasa percaya diri dan berkembang menjadi diri sendiri.

Cengkraman birokrasi dan favoritisasi sekolah-lah yang menyulitkan penyelenggara pendidikan formal di negara kita untuk menerapkan falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Alangkah naifnya jika praktik-praktik kelas mengekang hak anak untuk mengembangkan diri juga dilanggengkan dalam penyelenggaraan pendidikan seperti “sekolah-rumah (*homeschooling*) tunggal” (dilaksanakan sendiri).

Hanya segelintir orang yang memiliki falsafah pendidikan yang khas untuk melakukan usaha sadar dan terencana sesuai amanat UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

J. Peluang dan Tantangan

Orang tua adalah pendidik terbaik. Yakinlah anak tak akan membiarkan orang tua sendirian dalam menyelenggarakan “sekolah rumah tunggal” agar anak terus tumbuh dengan pendidikan anak merdeka. Keyakinan ini sangat bermakna dalam proses tumbuh bersama dengan kemerdekaan untuk mengembangkan bakat-bakat luhur kemanusiaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tantangan tersulit bagi keluarga yang menyelenggarakan “sekolah

rumah tunggal” adalah menjaga agar falsafah khas dapat diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman yang tumbuh subur dan kreatif dalam menata ulang pengalaman berikutnya, seperti yang dirumuskan Jhon Dewey. Pengetahuan tentang perkembangan anak harus terus diasah untuk mewujudkannya.

Sangat disayangkan, referensi yang ada kebanyakan hanya menggambarkan perilaku perkembangan anak dalam konteks sekolah. Berbagai situasi *homeschooling* yang memberikan gambaran teknis peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan “sekolah-rumah” serta berbagai pengalaman dengan keluarga penyelenggara ‘sekolah-rumah tunggal’ maupun “majemuk” (baca: komunitas) akan mengisi kekurangan ini.

Menguatnya sekolah rumah sebagai model pendidikan alternatif pilihan masyarakat bukan berarti lepasnya tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan, terutama untuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Sampai saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menghindari dari kewajiban untuk menyediakan pendidikan dasar gratis dan pendidikan sejahtera.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan sekolah gratis, menghapus kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru belum terwujud juga. Jangan biarkan pemerintah menghambat gerakan “sekolah-rumah tunggal” dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang tidak konsisten dengan Undang-undang.

K. Pendidikan Alternatif dan Perubahan Sosial

Pendidikan anak bangsa tidak terjadi di ruang hampa, tetapi realita perubahan sosial yang amat dahsyat. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu subsistem dari seluruh sistem pendidikan yang terdiri dari sentra keluarga,

masyarakat, media, dan sekolah. Masyarakat modern (atau pascamodern) ditandai dengan renggangnya hubungan antar manusia karena keterasingan masing-masing. Tanggung jawab pendidikan generasi muda telah ditumpukkan dengan berat sebelah kepada lembaga-lembaga pendidikan formal terutama sekolah.

Sentra pertama keluarga, merupakan cermin masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat membawa dampak dan perubahan dalam struktur, bentuk, maupun nilai-nilai keluarga. Konsep keluarga inti dengan satu bapak yang bekerja mencari nafkah, satu ibu yang mengayomi dengan penuh kasih sayang di rumah, dan anak-anak yang bahagia dan mendapat cukup perhatian, sulit dipertahankan dalam era pascamodern. Keluarga dan sekolah.

Kekurangsadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan fenomena pedang bermata dua. Seperti pada APBN dan APBD, anggaran rumah tangga untuk pendidikan (formal) dalam kebanyakan keluarga di Indonesia masih rendah. Fenomena ini bisa jadi merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap signifikansi proses pendidikan dalam sistem sekolah formal guna mengubah kualitas hidup. Proses di sekolah dianggap ritual formalitas yang berkisar dari kemajemukan hingga membelenggu anak, namun perlu dilakukan agar mendapat pengakuan resmi pemerintah berupa ijazah agar bisa masuk jenjang berikutnya. Sekolah hanya dianggap sebagai lembaga pemberi ijazah.

Yang menggembirakan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat memprakarsai sekolah-sekolah alternatif guna menampung anak-anak miskin yang tidak bisa diakomodasi sekolah-sekolah formal. Ada sanggar anak, sekolah anak rakyat, komunitas pinggir kali, dan sebagainya. Dikalangan kelas menengah, muncul gerakan *homeschooling* sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sekolah formal. Meski masih bersifat sporadis dan belum cukup banyak dibanding

kompleksitas berbagai persoalan di masyarakat, upaya-upaya alternatif ini merupakan bagian dari dinamika proses negosiasi dimensi formal dan nonformal pendidikan. Ketika sekolah-sekolah formal (negeri dan swasta) terjebak dalam hegemoni negara dan tidak berdaya untuk mengakhiri gejala dehumanisasi dalam pendidikan dan saat lembaga-lembaga pelatihan non-formal (kursus dan lembaga bimbingan belajar) ikut terjebak industrialisasi dan komodifikasi ilmu pengetahuan dan keterampilan, beberapa lembaga swadaya masyarakat memprakarsai sekolah-sekolah alternatif yang diharapkan bisa menembus kebekuan dan *status quo* dalam sistem pendidikan nasional.

Seperti kata Habermas, *before a society can effectively intervene in its own course, it must first develop a subsystem that specializes in producing collectively binding decisions*. Berbagai kegiatan pendidikan alternatif sedang melakukan suatu perjalanan panjang yang diharapkan akan bisa mengajak masyarakat untuk memberdayakan dan mengatur diri demi kebaikan di masa datang.

BAB III

PERGAULAN BEBAS DIKALANGAN REMAJA

A. Pergaulan Muda Mudi

Manusia akan selalu terlibat dalam pergaulan. Pergaulan bisa disorot secara khusus akan memberikan gambaran yang berbeda-beda. Ada pergaulan yang menggambarkan hubungan reaktif saja, seolah-olah antara dua individu atau lebih terjalin hubungan bagaikan tanya jawab saja. Adapula pergaulan dimana individu-individu yang bersangkutan aktif dan kreatif menciptakan hubungan dimana masing-masing saling memajukan taraf kehidupannya dan saling menyempurnakan martabatnya.

Pergaulan merupakan suatu hubungan antar manusia yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi pergaulan acapkali menimbulkan persoalan, sehingga justru menimbulkan kesulitan bagi yang bersangkutan. Pergaulan yang mengakibatkan timbulnya kesulitan, kurang membantu kelancaran hidup bahkan menimbulkan kegoncangan jiwa yang menghambat dan merugikan perkembangan individu yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pergaulan:

1. Pengenalan individu lain: Menenal individu lain sebagai seorang individu yang lain dan tidak sama dengan diri kita sendiri. Menenal individu lain berusaha mengetahui sifat-sifat, sikap, pandangan dan latar belakangnya yang telah membentuk individu lain itu dan yang mendasari kepribadiannya maupun tingkah lakunya.

2. Pengertian terhadap individu lain: Mengerti bahwa individu lain memiliki ciri khas, sifat khusus, dan latar belakang masing-masing. Adanya perbedaan ini bahwa perbedaan tersebut perlu diubah dengan maksud agar orang lain dipaksa menyamakan dirinya dengan kita.
3. Dalam pergaulan, pada setiap individu perlu adanya keterbukaan diri: menerima, melalui pertimbangan, apa yang diberikan oleh orang lain dalam bentuk ilmu, pendapat dan pandangan; membuka jalan pikirannya supaya dapat dimengerti oleh orang lain demi kelancaran suatu komunikasi.

B. Pergaulan Bebas Sebagai Fenomena Sosial

Dalam memasuki masa dewasa ini kita cenderung menginginkan kesenangan duniawi saja, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Kita banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang tanpa ada batas. Ini akibat adanya pergaulan bebas yang terjadi pada sekarang. Anak remaja sekarang banyak menyalah artikan pergaulan bebas yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau kita bebas melakukan perbuatan apapun itulah yang ada dibenak mereka semua. Salah satu contoh yang dilakukan anak remaja sekarang adalah *seks bebas*. Biasanya para remaja melakukan perbuatan- perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahunya dan ingin mencoba sesuatu. Seperti halnya seks bebas, mereka melihat adengan- adengan yang melanggar agama akhirnya nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Merekapun melakukan hal itu dengan pasangannya tapi bukan isintrinya.

C. Maraknya Pergaulan Bebas

Pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang

tiada akhirnya yakni di surga. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu, yang paling parah mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan. Terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukannya tanpa memperhatikan dampaknya. Remaja sekarang mengenal *istilah* pergaulan bebas, mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian, arti yang sesungguhnya kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja dan apabila ada teman kita itu kelakuannya menyimpang jangan kita tiru itulah arti yang sebenarnya.

Arti pergaulan adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana "*bebas*" yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Dilihat dari segi katanya dapat ditafsirkan dan dimengerti apa maksud dari istilah pergaulan bebas.

Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat An- Nuur: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِي لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ
زِينَتُهُنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

30. katakanlah kepada orang laki- laki yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.
31. katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah suami mereka, atau putera- putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita- wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak- anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An- Nuur: 30-31)

Telah dijelaskan bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Lalu bagaimana hal yang terjadi dalam pergaulan bebas? Tentunya banyak hal yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak dapat menjamin kesucian seseorang.

D. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas

Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. kurang perhatian orangtua, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama tetapi semua berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan/agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan dan pada kondisi ketidaksiapan berumah tangga serta bertanggung jawab terjadilah aborsi dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit HIV/AIDS atau kematian.

Berikut ini faktor penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman.
2. Pengaruh lingkungan seperti orangtua, teman, sekolah, dan masyarakat.

Sikap mental yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya tidak

pantas, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Ketidakstabilan emosi dipicu oleh penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga atau orangtua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup mereka jalani sehingga pelarian dari hal tersebut berdampak negatif.

Ketika remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus menerus (dari segi prestasi bagi remaja yang sering gagal atau peraturan yang terlalu mengikat), lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif disekelilingnya.

3. Pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan

Hasil penelitian memaparkan para remaja tidak memiliki pengetahuan khusus serta komprehensif mengenai seks. Informasi tentang seks mereka dapatkan melalui teman (65%), film porno (35%), sekolah (19%), dan orangtua (5%). Dari persentase ini dapat dilihat bahwa informasi dari teman lebih dominan dibandingkan orangtua dan guru, padahal teman sendiri tidak begitu mengerti dengan permasalahan seks ini, karena dia juga mentransformasi dari teman yang lainnya.

4. Perubahan zaman & kegagalan menyerap norma

Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah ada tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi (peradaban modern).

E. Dampak Pergaulan Bebas Bagi Masyarakat

Pergaulan bebas identik sekali dengan namanya “*dugem*” (dunia gemerlap). Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas. Yang akhirnya berujung kepada HIV/AIDS, dan pastinya setelah terkena virus ini kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Selain dari seks bebas maraknya pergaulan bebas juga menimbulkan para remaja yang minum-minuman dan mabuk- mabukkan. Ada juga yang sering minum obat- obat terlarang. Padahal mereka tidak tahu akhirnya dari perbuatan mereka akan menimbulkan kematian.

F. Ciri- Ciri Pergaulan Bebas

1. Penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya
2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji
3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat
4. Rasa ingin tahu yang besar
5. Rasa ingin mencoba dan merasakan
6. Terjadi perubahan- perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi
7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal.
8. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya.
9. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi

10. Terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan sebagainya.

G. Cara Menanggulangi Pergaulan Bebas

Seharusnya orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa dia bergaul. Ini salah satu cara untuk menanggulangi pergaulan bebas. Tetapi jika mereka sudah terjerumus masih ada cara dengan psikoterapi. Tetapi lebih baik mencegah dari pada mengobati. Maka dari itu seharusnya orang tua serta masyarakat sekarang lebih waspada dalam bergaul dan menjaga nafsu birahi.

Kita semua juga harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi walaupun kata-kata tersebut sering 'didengungkan' tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain di atas masih banyak cara menanggulangi pergaulan bebas lainnya, antara lain:

1. Menjaga keseimbangan pola hidup yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat, misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif.
2. Jujur pada diri sendiri. Yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing. Sehingga pergaulan bebas dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri.
3. Perlunya remaja berfikir untuk masa depannya. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan "Apa yang akan terjadi pada diri sendiri nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik?"kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri remaja. Dengan

itu maka remaja-remaja akan berfikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV/AIDS nantinya.

H. Perubahan Kebudayaan Dalam Pergaulan Bebas

Perubahan sosial dan budaya dapat menuju ke arah yang positif maupun yang negatif. Perubahan sosial sendiri dapat didefinisikan suatu perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. Gillin John dan John Philip Gillin mengatakan arti perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan yang antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pasangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai teknologi, selera dan rasa keindahan atau kesenian, bahasa dan lain-lain dari pikiran serta karya maupun hasil karya manusia.

Perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang sosial dan kebudayaan didukung oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial seperti penemuan-penemuan baru, struktur sosial (perbedaan posisi dan fungsi dalam masyarakat), inovasi, perubahan lingkungan hidup, ukuran penduduk dan komposisi penduduk, dan inovasi dalam teknologi. Akan tetapi faktor-faktor tersebut belum mewakili adanya perubahan secara menyeluruh. Masih dibutuhkannya faktor-

faktor pendorong perubahan sosial untuk mencapai perubahan yang lebih menyeluruh.

Perubahan- perubahan tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Terkadang perubahan- perubahan tersebut manual pro dan kontra. Tidak sedikit orang- orang yang akan membenci perubahan karena mereka telah merasa nyaman dengan keadaan sebelumnya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi diterima atau tidaknya sesuatu unsur kebudayaan baru atau asing dalam suatu masyarakat seperti, terbiasa atau tidaknya masyarakat tersebut mempunyai hubungan atau kontak kebudayaan yang beda tersebut; bertentangan atau tidaknya kebudayaan baru tersebut dengan ajaran agama yang berlaku, dan karenanya tidak akan merusak pranata-pranata yang sudah ada; corak struktur sosial; ada tidaknya unsur- unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan baru tersebut; luas tidaknya skala kegiatan dan tingkat kesulitan dibuktikan kegunaannya oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Kehidupan manusia selalu berubah tiap waktu. Perubahannya bersifat fluktuatif dan terkadang tidak terlihat secara nyata. Perubahan tersebut merupakan suatu proses perjalanan kehidupan. Proses perubahan bisa terjadi secara cepat (revolusi) dan bisa terjadi secara lambat (evolusi). Semua perubahan terjadi karena manusia dengan sengaja mengubahnya ataupun manusia sama sekali tidak menghendaki perubahan tersebut namun tetap terjadi.

I. Islam Memandang Pergaulan Bebas

Banyak hal yang negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Ini semua telah terlukis oleh mereka dibelahan bumi Barat, yang dulu mengagung- agungkan kebebasan dalam segala hal, termasuk kebebasan seks, kini mereka menjerit. Angka perceraian sangat tinggi, dan pranata pernikahan diragukan. Akibat keluarga sebagai sendi masyarakat runtuh, kemudian terjadilah dekadensi moral (kemunduran atau kemerosotan moral). Wabah AIDS

menebarkan kengerian dan ketakutan karena semakin liarnya perlakuan masyarakat dalam *free-sex*. Apa yang terjadi di Barat dapat kita sinyalir dari tulisan George Balusyi dalam bukunya: "*Ledakan seksual*" yaitu "pada tahun 1962, Kennedy menjelaskan, masa depan Amerika diancam bahaya, sebab para pemudanya cenderung dan tenggelam di dalam syahwat sehingga tidak mampu memikul tanggung jawab yang harus dipikul di atas pundaknya. Setiap tujuh pemuda yang maju untuk jadi tentara, sebab syahwat yang telah mereka lampiaskan itu, telah merusak keseimbangan higienis dan psikis mereka".

Budaya *free-sex* tidak jauh berbeda dengan budaya pacaran. Dan dengan menghubungkan fakta yang terjadi di sekitar kita, banyak para pemuda dan pemudi yang mengaku dirinya muslim tetapi mereka melakukan perbuatan zina. Jika hal ini dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi kelanjutan da'wah Islam. Dalam Q.S. Al-Isra': 32 dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk" (Q.S. Al-Isra': 32)

Pergaulan bebas adalah satu satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan oranglain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan (*interpersonal relationship*). Pergaulan juga adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Jadi pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum.

Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana remaja dapat menempatkan dirinya sebagai remaja yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama dan norma yang berlaku didalam masyarakat serta dituntut peran serta orangtua dalam memperhatikan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari anaknya, memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan seks yang benar. Oleh sebab itu permasalahan hal merupakan tugas seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Usaha untuk pencegahan sudah semestinya terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita. Agar lebih bermoral, agar lebih bisa diandalkan untuk kebaikan negara ke depan.

BAB IV

DROP OUT (PUTUS SEKOLAH)

A. Peningkatan Angka Putus Sekolah

Keinginan untuk segera membebaskan anak-anak usia sekolah (7-15 tahun) dari ancaman buta huruf dan kemungkinan putus sekolah tampaknya masih belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kendati lewat program jaringan pengaman sosial pemerintah telah berupaya menyediakan beasiswa untuk membantu kelangsungan pendidikan peserta didik, khususnya dari keluarga kurang mampu. Tetapi, karena faktor yang sifatnya struktural, maka angka siswa putus sekolah dan rawan putus sekolah diperkirakan akan tetap tinggi.

Putus sekolah adalah predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya kejenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya seorang warga masyarakat/ anak yang hanya mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD) sampai kelas lima, disebut putus sekolah (belum tamat SD/ tanpa STTB). Demikian juga seorang warga masyarakat yang ber-STTB SD kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas dua saja, disebut putus sekolah SMP, dan seterusnya.

Secara garis besar, beberapa hal yang terjadi akibat meluasnya tekanan kemiskinan dan keterbatasan kondisi keuangan pemerintah terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak adalah:

1. Akses atau kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan publik dibidang pendidikan jelas akan semakin berkurang, dan bahkan tidak mustahil sama sekali pupus karena mereka terpaksa masuk dalam

situasi yang teramat sulit dan dilematis antara meneruskan sekolah ataukah membantu orang tua untuk menutupi kebutuhan hidup yang semakin mencekik akibat situasi krisis.

2. Bersama dengan terjadinya gelombang anak putus sekolah dan tingginya angka siswa yang tidak meneruskan ke jenjang SLTP, tidak mustahil akan menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitasi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terpaksa terperangkap pada kegiatan produktif atau sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi.
3. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi terhadap kasus-kasus eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif menjadi semakin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tak terelakkan. Bahkan bisa jadi pula terjadinya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan kemudian berubah menjadi “kambing hitam” untuk menutup-nutupi kurangnya perhatian dan ketidakmampuan kita untuk memberikan pelayanan pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu hak anak-anak.

B. Pengertian Drop Out (Putus Sekolah)

Drop Out adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya, atau sebelum lulus. *Drop out* demikian ini perlu dicegah, oleh karena hal demikian dipandang sebagai pemborosan bagi biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuknya. Banyaknya peserta didik yang *drop out* adalah indikasi rendahnya produktivitas pendidikan. Tingginya angka *drop out* juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak

anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah dipandang sebagai masalah pendidikan dan sosial yang amat serius selama beberapa sekade terakhir ini. Dengan meninggalkan sekolah sebelum lulus, banyak individu putus sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga kesejahteraan ekonomi dan sosialnya menjadi terbatas sepanjang hidupnya sebagai orang dewasa kelak. Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

C. Faktor-faktor Terjadinya *Drop Out* (Putus Sekolah)

Seorang anak mengalami putus sekolah bisa disebabkan oleh beberapa hal:

a. Faktor Internal

1. Kondisi Medis-Neurologis dalam diri anak

Dalam ilmu neuropsikologis diungkapkan hubungan antara sistem syaraf dan fungsi kognitif. Ilmu medis sekarang telah melakukan pendekatan neuropsikologi kognitif yakni pembelajaran pembelajaran mengenai hubungan antara mental dan otak saat memperhatikan pasien trauma pada otak atau penyakit-penyakit neurologik. Prinsip dasar pengenalan fungsi masing-masing bagian otak akan memandu kita untuk mengetahui tempat gangguan ketika seseorang mengalami hambatan fungsi khusus pasca trauma otak. Pendekatan mutakhir neuropsikologis kognitif, berusaha melakukan pencarian pemahaman fungsi normal mental dan otak dengan cara mempelajari gangguan jiwa atau penyakit mental. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu gangguan pada otak yang dapat

menyebabkan terhambatnya proses penerimaan informasi pada anak.

2. Keadaan psikologis anak

Dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemooh karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologis anak sehingga anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya.

3. Kestabilan emosi anak

Seorang anak yang masih labil keadaan emosi serta minimnya pengetahuan dalam bagaimana memilih teman sehingga bisa terpengaruh ikut-ikutan diajak bermain seperti *play station* sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah.

b. Faktor Eksternal

1. Keluarga

a) Perhatian orang tua

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu penyebab dari kurangnya perhatian orang tua.

b) Hubungan orang tua yang kurang harmonis

Hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya

sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

- c) Latar belakang pendidikan orang tua
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh dalam pendidikan seorang anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi tidak akan membiarkan anaknya mengalami putus sekolah. Mereka pasti menginginkan hal terbaik untuk anaknya. Namun, terkadang ada faktor lain yang mendukung anak untuk tetap putus sekolah walaupun orang tuanya berpendidikan. Semua itu seperti suatu siklus dalam masalah pendidikan anak.
- d) Hubungan sosio-psikologis antara orang tua dan antara anak dengan orang tua.
Seorang anak yang berada dalam situasi keluarga yang kurang harmonis dapat menjadi pemicu hilangnya motivasi anak untuk bersekolah. Jika motivasi anak sudah hilang maka untuk mengembalikannya akan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
- e) Besarnya keluarga serta orang-orang yang berperan dalam keluarga
Keadaan keluarga yang mempunyai anggota cukup banyak juga memicu potensi putus sekolah anak apalagi jika didukung dengan lemahnya ekonomi keluarga maka dalam satu keluarga tersebut akan ada anak yang terpaksa “mengalah” dalam mendapatkan pendidikan. Kasus keluarga dengan banyak anak dan ekonomi yang lemah, membuat anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi dan berusaha mencari penghasilan tambahan untuk membantu orang tuanya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

2. Kesulitan ekonomi

Sejumlah studi menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang mendominasi terhambatnya siswa untuk mendapatkan pendidikan secara utuh. Hal ini dikarenakan orang tua siswa tidak mampu memberikan fasilitas lengkap kepada anaknya untuk bersekolah. Siswa dari keluarga miskin terpaksa membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi biaya kehidupan mereka. Bahkan terkadang orang tuanya lah yang meminta mereka untuk berhenti sekolah agar bisa membantu secara penuh dalam mencari nafkah. Mereka pun kebanyakan menjadi buruh upahan atau menjadi pedagang asongan di jalanan. Anak pun merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

3. Lingkungan sekolah

Faktor utama siswa mengulang atau tidak naik kelas bermacam-macam. Namun demikian, faktor ekonomi pun mempengaruhi siswa dalam perkembangan kognitifnya di kelas. Mereka telah kehilangan kesempatan dalam mendapatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan PR serta fasilitas belajar yang memadai di rumah karena kesibukan bekerja membantu orang tua. Selain itu hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan sosial, mental serta spiritual anak.

- a) Ketentuan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lain

Salah satu faktor terjadinya *drop out* siswa di sekolah karena diterapkannya sistem tidak naik kelas, dan bukannya sistem maju berkelanjutan (*continous progress*) atau naik secara otomatis (*authomatic promotion*).

b) Pelaksanaan proses belajar mengajar

Pelaksanaan proses belajar-mengajar termasuk disini dedikasi serta komitmen guru dalam mendidik dan mengajar siswa serta ketersediaan fasilitas pendidikan di masing-masing sekolah.

c) Kemampuan dan usaha belajar dari siswa itu sendiri

Motivasi siswa yang kurang dalam belajar merupakan salah satu penyebab *drop out*. Kemalasan serta tidak kemauan untuk bersekolah juga dipengaruhi faktor bekerja dan lingkungan yang tidak kondusif dalam mendukung siswa untuk belajar.

c. Segi Lingkungan Masyarakat: Psikososial-kultural

Istilah psikososial berarti tahap-tahap kehidupan seseorang dibentuk oleh pengaruh sosial melalui interaksi-interaksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologi. Pada tahap ini anak akan mengarahkan segala energi dalam dirinya untuk menguasai pengetahuan serta keterampilan intelektual tertentu. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat sesuatu sangat besar tetapi adanya keterbatasan dalam pengetahuannya sehingga terkadang menjadi hambatan dan kegagalan dalam diri anak akan cenderung rendah diri. Ditinjau secara kultural, anak usia dini dipersiapkan untuk mewarisi budaya-budaya yang baik dari pendidikan. Dengan demikian pendidikan disesuaikan dengan kultur masyarakat sehingga anak didik akan berkembang sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku.

Dalam kultur masyarakat banyak dipengaruhi persepsi atau pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Untuk kasus anak didik yang putus sekolah maka harus diteliti lebih jauh mengenai faktor penyebabnya. Anak didik yang bergaul dengan temannya yang putus sekolah

akan berpengaruh kepada mereka. Anak-anak yang dibesarkan di kota pola pikirnya berbeda dengan anak yang tinggal di desa, dimana anak kota lebih bersikap aktif dan dinamis sedangkan anak desa cenderung bersikap statis dan lamban. Keadaan geografis juga mempengaruhi dimana kondisi letak sekolah yang jaraknya berjauhan dapat memberikan stigma pesimis bagi siswa dan orang tua karena waktu dihabiskan dalam perjalanan menuju ke sekolah akibat akses transportasi dan jalan yang kurang memadai.

D. Usaha Mengatasi Anak *Drop Out* (Putus Sekolah)

Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah harus ada berbagai usaha pencegahannya sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah (pemerintah) maupun oleh masyarakat. Sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin.

Usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya anak putus sekolah diantaranya dapat ditempuh dengan cara:

1. Membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak.
2. Memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar.
3. Mengadakan pengawasan di rumah serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah.
4. Tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar.
5. Tidak memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang terlalu banyak.
6. Langkah *preventif*: membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini, agar kelak bila diperlukan dapat merespon tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat secara positif, sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi

beban masyarakat, atau menjadi parasit dalam masyarakat. Misalnya keterampilan-keterampilan kerajinan, jasa, perbengkelan, elektronik, PKK, fotografi, dll.

7. Langkah pembinaan: membekali pengetahuan-pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan zaman, melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan dalam lembaga-lembaga sosial/pendidikan di luar sekolah seperti LKMD, PKK, Karangtaruna, dll.
8. Langkah tindak lanjut: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengada-ada, termasuk pembinaan hasrat pribadi untuk berkehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Misalnya memberikan penghargaan, bonus, keteladanan, kepahlawanan dan sebagainya, sampai berbagai kemudahan untuk melanjutkan studi dengan program belajar jarak jauh (BJJ), seperti Universitas terbuka, sekolah terbuka, dan sebagainya. Juga dapat melalui koperasi dengan berbagai kredit (KIK, KCK, Kredit Profesi, dll).

Untuk mencegah dan menangani kasus anak yang sudah terlanjur putus sekolah, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa untuk menarik kembali anak-anak yang sudah terlanjur keluar atau *drop out* dari sekolah umumnya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, kebijakan dan langkah yang paling strategis untuk mencegah agar anak-anak tidak terlanjur putus sekolah adalah melakukan upaya preventif sedini mungkin, khususnya setelah diketahui adanya indikasi bahwa seorang siswa akan putus sekolah. Awal mula atau indikasi yang diperlihatkan siswa yang berpotensi putus sekolah adalah:

- 1) pernah tidak naik kelas,
- 2) nilai ulangan dan nilai rapor yang kurang memenuhi standar, dan
- 3) sering membolos. Siswa dengan indikasi di atas dikategorikan sebagai siswa yang rawan drop out. Bila sejak dini telah dicoba ditangani maka peluang untuk mencegah mereka putus sekolah akan menjadi lebih besar. Dari pihak sekolah sendiri, seharusnya ada kesadaran bahwa siswa yang rawan drop out bukan malah diperlakukan sebagai siswa yang bermasalah dan sering dihukum atau menjadi objek pembinaan guru BK. Tetapi, justru siswa yang rawan drop out ini harus memperoleh perhatian dan bimbingan khusus, termasuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok sekunder yang ada di masyarakat untuk ikut memfasilitasi perbaikan prestasi belajar mereka lewat bimbingan dan pembinaan yang sifatnya lebih empatif.

E. Program untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah dan Siswa Rawan Drop Out

Isu Prioritas	Program	Tujuan
Di kalangan keluarga miskin anak umumnya memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber penghasilah penting keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin - Pengembangan alternatif sumber-sumber penghasilan keluarga - Pemberdayaan potensi lansia 	Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan menanggulangi peran anak sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga.
Bagi anak-anak kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU perlindungan anak 	

melakukan pekerjaan televisi dan bekerja setelah sekolah adalah beban ganda yang terlampau berat untuk ditanggung dalam waktu yang bersamaan.	dan konferensi ILO 138.	
Acara dan tayangan televisi adalah godaan terbesar yang dihadapi anak-anak di pedesaan, sehingga waktu mereka untuk belajar cenderung lebih pendek daripada waktu untuk menonton televisi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan gerakan mematikan televisi dan membudayakan kebiasaan gemar membaca anak-anak 	Membatasi godaan tayangan televisi bagi anak-anak
Siswa yang putus sekolah umumnya sebelumnya memperlihatkan indikasi rawan DO (pernah tidak naik kelas, prestasinya kurang, dan sering	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan atau bimbingan khusus terhadap siswa rawan DO. - Pelibatan kelompok sekunder di masyarakat dalam penanganan siswa rawan DO. 	Memperbaiki prestasi siswa rawan DO

membolos).		
Anak perempuan lebih cenderung lebih potensial putus sekolah karena kebiasaan pernikahan dini dan kultur patriarkhis.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan dan pencegahan kasus pernikahan dini. - Sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat desa. 	Mencegah anak perempuan mengalami diskriminasi gender, khususnya dibidang pendidikan.
Dalam kenyataan kualitas dan prestasi belajar riil anak-anak di pedesaan, terutama di sekolah pinggiran acap kali memprihatinkan dan hasil katrolan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu dan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. - Pengembangan pendidikan usia dini anak. 	Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Anak yang bekerja umumnya menanggung beban kerja yang panjang yang membatasi waktu luang mereka untuk bermain layaknya anak-anak.		
Suasana belajar di sekolah,	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi sekolah dan ruang 	Membangun suasana belajar

sering kali tidak membuat anak enjoy dalam belajar, sehingga gairah untuk belajar secara sungguh-sungguh menjadi terganggu	kelas yang rusak. Pengembangan pendekatan MBS, khususnya joyfull learning	di sekolah yang menyenangkan bagi siswa/peserta didik.
Didalam masyarakat seringkali masih ada krisis kepercayaan dan bahkan pandangan yang kontra-produktif terhadap arti penting sekolah.	- Pengembangan program link and match	Menjamin kesempatan kerja bagi lulusan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa faktor yang memperbesar peluang siswa untuk putus sekolah yang telah dipaparkan maka hendaknya kita sebagai orang tua, guru dan anggota masyarakat mencegah agar tidak ada lagi anak yang mengalami putus sekolah.

BAB V

PORNOGRAFI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pornografi Sebagai Penyakit Masyarakat

Masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan hingga aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang yang dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, diantaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah. Atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah formal maupun guru mengaji, atau guru agama.

Bahkan, para pornografi tidak hanya orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggalpun menjadi korban pemerkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film vcd, tayangan-tayangan, gambar-gambar, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang dilihat, atau didengar, atau dibacanya atau disentuhnya benda-benda pornografi. Dalam hukum islam, sejak abad ketujuh masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudharatannya. Namun yang perlu secara dikemukakan adalah, sampai saat ini masih ada

pendapat bahwa hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak-hak kemanusiaan sebagai individu, kejam, demoralisi.

B. Pornografi Perspektif Etika, Moral Dan Akhlak

a. Pengertian Pornografi

Pornografi (dari bahasa Yunani *opvoyp i pornographia* – secara harafiah tulisan tentang *tulisan tentang* atau *gambar tentang pelacur*) (kadang kala juga disingkat menjadi “porn” atau “porno”) adalah penggambaran tubuh manusia atau secara seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan W.F Haung menyebutkan pornografi adalah penggunaan refresentasi perempuan (tulisan, gambar, foto, video, dan film) dalam rangka manipulasi hasrat (*desire*) orang yang melihat, yang didalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai “objek” seksual laki-laki.

Menurut Muntaqo pornografi dapat dirumuskan sebagai berikut: pornografi adalah pengungkapan permasalahan seksual yang erotis dan sensual melalui suatu media yang bertujuan atau dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi atau timbulnya rasa muak, malu, jijik bagi orang yang melihat, mendengar atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat setempat. Dalam pembahasan lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan satu definisi yang hampir sama. Yaiu pornografi adalah menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi. .

Dalam rancangan tersebut istilah pornografi didefinisikan dalam istilah visualisasik dan verbalisasi melalui media komunikasi massa atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan sensual dalam keadaan yang memberi kesan telanjang bulat dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara, atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup: ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhrim atau non muhrim, atau antar manusia dengan binatang, antar binatang, atau antar manusia yang hidup dengan manusia yang telah meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, coitus interruptus, yang bertujuan membangkitkan nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan atau memuakkan dan atau yang memalukan bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya.

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang pornografi dikatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh: dan bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan atau pertunjukan yang umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi berbeda dari etorika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrim/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Pornografi dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas tersengal-sengal. Film

porno menggabungkan gambar bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis. Kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut pornografi.

Dari berbagai definisi diatas, porno atau yang seringkali jua disebut pornografi adalah sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahkan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pornografi adalah bisnis raksasa karena telah berkembang pada sektor ekonomi yang melibatkan ribuan tenaga kerja serta ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses mudah, dan murah.

b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi

Di Indonesia, saat ini masih belaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diundangkan berdasarkan *koninkijlk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 n0.33 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku berdasarkan Undang-Undang nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan Mengubah kitab UU Hukum Pidana.

Menurut beberapa ahli hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, M.Ali Yafie, Mohammad Tahir Azhary, Malik Fajar, Jimly Asshiddiqie, dan Yuhsil Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam. Pasal-pasal yang perlu disesuaikan adalah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan beserta sanksinya yang diatur dalam buku kedua

Bab XIV tentang “kejahatan terhadap kesusilaan” pasal 281-296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “pelanggaran kesusilaan,” pasal 506, dan 532-535, pasal 540, pasal 541. Pentingnya ketentuan tindak pidana perzinahan, termasuk tindak pidana Islam, karena pelaksanaan hukum Islam bagi Umat Islam adalah wajib berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.”

Kenyataan sampai saat ini, hukum pidana Islam belum dijadikan sumber penyusunan rancangan hukum pidana Nasional (RUU-KUHP 1999-2000 dan RUU-KUHP 2002). KUPH dan RUU-KUHP 1999-2000 dan RUU-KUHP 2002 tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan, gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarnya.

Ditinjau dari hukum Islam, pendapat tersebut sangat tidak sesuai, karena hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti yang diatur dalam Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Tubuh, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan

memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

RUU-KUHP Tahun 2004 telah memuat ketentuan pornografi menjadi enam belas pasal (Pasal 468-483) dan RUU-KUHP Tahun 2005 telah memuat tujuh belas pasal (Pasal 467-483), RUU KUHP 2008 memuat ketentuan pornografi dan pornoaksi dalam Bab XVI, bagian kedua pasal 486 s/d 479 (12 pasal).

Dampak negatif dari penyebaran pornografi yang sudah merebak sampai ke pedesaan merupakan kenyataan yang sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait harus segera mengambil tindakan yang cepat, tepat, dan benar untuk memberantas, menanggulangi, dan mencegah dampak pornografi yang lebih jauh. Pemberantasan, penanggulangan, dan pencegahan itu tak lain harus melalui peraturan perundang-undangan tersendiri yang terlepas dari KUHP maupun RUU-KUHP, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap Pornografi telah diwujudkan oleh MUI pusat, sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dalam masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui keputusan Fatwa Nomo 287 Tahun 2001 tentang prnografi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait menetapkan Peraturan Perundang-Undangan tentang pornografi. Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun Fatwa adalah:

Pertama, ayat-ayat Al-quran:

1. Surat al-Isra ayat 32, melarang setiap orang mendekati zina.
2. Surat an-Nur ayat 30, mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum laki-laki.

3. Surat an-Nur ayat 31, mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum perempuan.
4. Surat al-Ahzab ayat 59, memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. agar kaum perempuan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya (tata busana) agar mudah dikenal dan tidak diganggu.
5. Surat al-Maidah ayat 2, memerintahkan agar setiap orang saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.

Kedua, Hadis-hadis Rasulullah SAW:

1. Hadis Rasulullah yang melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, hadis yang melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Imam Malik, juga diriwayatkan Imam Ahmad.
2. Hadis yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang laki-laki yang berperenampilan seperti tokoh yang singgah di masjid, tetapi istrinya telanjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
3. Hadis yang melarang orang berkhalwat, diriwayatkan Imam Bukhori dari Ibnu Abbas dan hadis tentang penghuni neraka diantaranya kaum wanita yang berpakaian (seperti) telanjang, berlenggok-lenggok, menggoda atau memikat, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium baunya surga, diriwayatkan Muslim; dan
4. Hadis tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (trasparan), diriwayatkan Abu Daud.

Kaidah Ushul Fiqih:

1. Kaidah ushul fiqih menyatakan bahwa “semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram”
2. Kaidah-kaidah fiqih;
 - a. Menghindarkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat.
 - b. Segala mudharat harus dihilangkan

- c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram
- d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram

Berdasarkan sumber-sumber hukum dari kaidah ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh di atas maka MUI Pusat memutuskan:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk mengambil gambarnya, baik dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

Dengan melihat isi ketentuan fatwa MUI tersebut dengan jelas menunjukkan kesungguhan MUI dalam menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi.

C. Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya

a. Intensitas Menonton dan Membaca Pornografi

Intensitas menonton dan membaca pornografi bagi siswa tergolong “tinggi”. Temuan ini didukung oleh pendapat Sarlito W Sarwono (2008: 165) menyatakan bahwa anak yang beranjak remaja cenderung melakukan aktifitas-aktifitas seksual prasenggama seperti melihat buku atau film cabul, berciuman, berpacaran, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa anak yang beranjak remaja cenderung melakukan aktifitas seksual, dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin manusia mencapai tahap kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna pula. Saat mencapai tingkat kematangannya remaja tidak mendapatkan pendidikan seks dengan baik, maka akan menimbulkan perilaku seks yang menyimpang. Seperti menonton dan membaca bacaan yang bersifat pornografi.

b. Perilaku seksual menyimpang terhadap diri sendiri

Perilaku menyimpang terhadap diri sendiri berada pada kategori “tinggi”. Temuan ini didukung oleh pendapat Donald, dkk (2004), pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:

1. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual.

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli dibidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat,

pornografi, atau aktivitas porno baik dari internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain ataupun siapapun objek yang bisa mereka jangkau.

2. Membentuk sikap, nilai dan perilaku negative
Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat terganggu proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita. Kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual
3. Tertutup, minder dan tidak percaya diri
Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang permisif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks bebas diluar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi oleh teman-teman yang terbimbing dan bebas dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan keagamanya ia akan merasa paling berdosa.

c. Perilaku Seksual Menyimpang pada Orang Lain

Perilaku menyimpang pada orang lain berada pada kategori “tinggi” dilakukan oleh siswa. Temuan ini didukung

oleh pendapat Donald, dkk (2004), dampak pornografi terhadap orang lain sebagai berikut:

1. Tindakan kriminal atau kejahatan, tindakan ini umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, terutama norma agama yang berlaku di masyarakat.
2. Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim dilakukan. Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain, lesbianisme, dan homoseksual, sodomi, sadisme, dan pedophilia.

D. Upaya dalam Mengatasi Dampak Pornografi

Tindakan preventif mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial secara represif berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial secara represif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya sesuatu pelanggaran. Pengendalian sosial secara represif dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Pornografi perlu ditangai karena akan berdampak sosial negatif bagi masyarakat karena menyebabkan dekadensi moral dan penipisan rasa kesusilaan dan norma di masyarakat. Bagi remaja karena mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, penyakit menular, HIV/ AIDS dan lain-lain. pornografi juga bisa mengakibatkan timbulnya kekerasan seksual lainnya seperti phaedophilia, homoseks, lesbian, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat, bahaya pormografi dapat menyebabkan munculnya desakralisasi seks, hancurnya lembaga perkahwinan, hidup bersama tanpa menikah, hubungan diluar nikah menjadi tidak haram, anak tumbuh dan berkembang tidak dalam keluarga yang lengkap (*single parentood*).

Upaya pencegahan bahaya pornografi merupakan usaha bersama semua elemen masyarakat. Peran keluarga misalnya, membentengi diri dengan melakukan komunikasi secara dan intensif, menanamkan nilai-nilai agama, norma dan budi pekerti, mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Pemerintah ambil bagian dalam menciptakan masyarakat yang tidak permissif, pengaturan perangkat hukum yang jelas, menolak informasi yang tidak bermakna, mensosialisasikan UU anti pornografi. Demikian media massa bersama-sama berkomitmen melalui program kampanye dengan menyebarkan sticker kaos, leaflet dan sebagainya. Keluarga, masyarakat/pemerintah, dan media massa mesti berkolaborasi mencegah penyebaran pornografi.

BAB VI

KIPRAH PEREMPUAN DALAM PENTAS PENDIDIKAN

A. Peranan Perempuan Dalam Berbagai Perspektif

Wanita memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Wanita merupakan madrasah pertama dan utama dalam kehidupan umat manusia. Ia mendidik seorang manusia dimulai ketika janin itu diberi nyawa dalam kandungan. Ia mengajak janin berdialog dan mengajarkan berbagai macam hal tentang kebaikan, memperdengarkan ayat-ayat suci Al-quran yang merupakan sebaik-baiknya kata dan nada yang ada di dunia ini.

Dari rahim wanita suci nan mulialah yang akan mengeluarkan anak-anak yang dapat memperjuangkan agama Allah SWT kelak. Bagaimana tidak? seorang wanita mulia akan mengajarkan hal-hal kebaikan sejak anaknya masih berada di alam kandungan. Sudah dapat dipastikan, bidadari itu masih sangat mendambakan si jabang bayi lahir ka dunia. ketika lahirpun, si bayi disambut dengan air mata suka cita.

B. Sekilas Tentang Konsep Gender

Gender menunjukkan perilaku atau pola aktifitas yang oleh masyarakat atau budaya dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan istilah ini. Ada beberapa istilah lain seperti *role gender* (peran gender) menunjukkan perilaku, minat, sikap, ketrampilan dan kepribadian yang oleh suatu budaya dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian *Identity gender* (identitas gender) menunjukkan

kesadaran atau pemahaman seseorang bahwa ia telah mengambil peran gender tertentu. Terakhir adalah *stereotype* gender (*gender stereotype*) yang menunjukkan karakteristik psikologis atau perilaku yang secara khusus diyakini sebagai milik laki-laki atau perempuan.

Gender sebagai suatu keyakinan dan konstruksi sosial, yang disosialisasikan secara turun temurun dan terinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat ternyata mengembangkan suatu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan.

Dalam proses identitas sangat penting dalam kebangkitan islam dewasa ini. karena semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam kebangkitan ini, semakin bertambah perhatian dicurahkan terhadap soal gender dalam bentuk identitas. Sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing gender baru belakangan ini saja dikemukakan: sebagian besar diilhami oleh kondisi wanita.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama terkait dengan pembagian peran masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berfikir, bertindak, dan berperan dalam segmen kehidupan sosial.

Dengan ini, perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsinya yang berhubungan dengan biologinya. Al-quran

juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang dipertahankan oleh budaya mereka. yang mengakibatkan gender dan fungsi-fungsunya gender memperbesar persepsi tentang perilaku yang secara moral layak dalam suatu masyarakat. Karena Al-quran adalah pedoman moral, maka ia harus berkenan dengan persepsi moralias oleh individu dari beragam masyarakat.

Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah keadilan dan kesetaraan gender, baik pada aspek akses, mutu, dan relevansi maupun pada aspek manajemen pendidikan.

C. Peranan Perempuan Dalam Dunia Pendidikan

1. Ibu Sebagai Pendidik

Sifat wanita sesuai dengan tugas ibu seperti tahan sabar dengan kelakuan anak karena kasih sayang yang telah tertanam dalam jiwanya sesuai dengan sifat keibuannya. Wanita telah diciptakan Allah melahirkan anak. Mereka jugalah yang paling sesuai untuk memelihara dan seterusnya mendidik. Proses pertumbuhan manusia adalah lebih lambat jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ibulah yang paling rapat dengan anak dan mengetahui apa yang diperlukan anaknya. Ibu mengikuti setiap perkembangan anak dan dia dapat mengetahui kemampuan anak-anaknya yang berbeda menurut umur dan kebijaksanaan anak. Oleh karena itu mudalah baginya untuk mendidik anak-anaknya mengikuti tiap-tiap individu anak itu. Ibu dikatakan sekolah, kerana jika anak itu dididik dengan baik oleh sang ibu, maka terwujudlah masyarakat yang baik.

2. Sebagai Individu Dalam Masyarakat

Selain sebagai istri dan ibu, wanita juga tidak dikecualikan dari menyampaikan ilmu oada kalangan wanita, yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lelaki seperti memberi contoh sebagai wanita berkepribadian mu'min, mengajar tentang sesuatu yang sulit seperti perincian dakam hal bersuci seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Allah SWT. Menurut Mansour Faqih, sex berarti jenis kelamin yang merupakan penyifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Perbedaan anatomi biologis ini tidak dapat diubah dan bersifat menetap, kodrat dan tidak dapat bertukar. Oleh karena itu perbedaan tersebut berlaku sepanjang zaman dan dimana saja.

Kedudukan wanita dalam masyarakat mempengaruhi corak masyarakat. Penetapan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik lelaki maupun perempuan adalah untuk menjamin supaya golongan dalam masyarakat itu tidak dizalimi atau ditindas. Setelah kita jelas bahwa ciptaan wanita tidak sama dengan lelaki, kemampuannya juga berbeda dengan lelaki, maka wajar sekali bila kewajiban yang diberikan Allah SWT berbeda sesuai menurut kejadiannya itu. Walaupun begitu, mereka tidaklah dipisahkan sama sekali karena peranan wanita dan lelaki adalah saling membantu antara satu sama lain.

D. Persoalan Yang Terjadi Dalam Dunia Pendidikan

1. Bias Gender Dalam Pendidikan

Bias gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender. Berbagai bentuk

kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara gratis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklarifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

- a. Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan. Perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah dinegara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.
- b. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi kemampuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jejaring pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jejaring pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
- c. Perlakuan tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berfikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap

perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

Menurut Philip Robinson, ketimpangan dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil atau outcome pendidikan. Akses perempuan ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi masih terbatas. Di Indonesia dalam penelitian yang dilakukan oleh Ace Suryadi, berdasarkan angka statistik kesejahteraan rakyat dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2000/2001 penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% yang bahkan lebih tinggi daripada laki-laki lulusan SD 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15%. Pendudukan perempuan yang berpendidikan SMA adalah 11,4% atau lebih rendah dari laki-laki berpendidikan sama yaitu sebesar 15,7%. Sementara itu, penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah mencapai 2,1% yang masih lebih rendah dari penduduk laki-laki yang berpendidikan sarjana 3,2%. Faktor yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan tingkat atas dan tinggi adalah jumlah sekolah yang terbatas, dan jarak tempuh yang jauh diduga lebih membatasi anak perempuan untuk bersekolah dibandingkan laki-laki. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab mengapa perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Laporan departemen pendidikan yang penyusunannya dibiayai UNICEF, juga menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Khususnya bagi anak perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, atau mereka yang berasal dari keluarga pedesaan. Selain itu juga ditemukan gejala pemisahan diskriminasi gender secara sukarela ke dalam bidang keahlian. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan

berperan dalam keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapatnya setereotype dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh, bidang ilmu sosial pada umumnya didominasi siswa laki-laki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK program studi teknologi industri baru mencapai 18,5%, program studi pertanian dan kehutanan 29,7%.

Sedangkan ketimpangan pada hasil pendidikan adalah perbedaan akhir pendidikan. Ketimpangan pada hasil pendidikan menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada prestasi pendidikan. Prestasi diantara mereka tidak sepadan. Prestasi laki-laki lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan berdampak pada kecenderungan melihat bahwa perempuan hanya bisa diterima pada sistem pendidikan tertentu. Di masyarakat berkembang sikap bahwa perempuan hanya cocok pada jenis pekerjaan tertentu dan tidak pantas memilih sistem pendidikan lainnya.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang berjenis kelamin perempuan maka, secara otomatis perempuan belum berperan secara maksimal. Pencanangan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, belum memberikan hasil yang signifikan terhadap hak-hak perempuan seperti yang digambarkan di atas, menurut Masdar F. Mus'udi pangkal mulanya adalah perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya perempuan itu lemah, lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut yang menimpa perempuan akibat adanya pelecehan ini. Pertama, melalui perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni kaum lelaki. Kedua, Pemimpin

atau imam hanya pantas dipegang oleh laki-laki, cenderung dimarginalkan, diletakkan di pinggir. Ketiga, karena kedudukannya yang lemah, perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki. Keempat, perempuan hanya menerima beban pekerjaan yang jauh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipukul kaum laki-laki.

Secara khusus faktor penyebab bias gender dalam pendidikan adalah:

- 1) Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD/Ibtidaiyah sudah mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijaksanaan pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi semakin sulit ditekan ke titik yang lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural itu diantaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki.
- 2) Pada tingkat SLTP/Tsanawiyah dan SMU/Madrasah Aliyah perbedaan angka partisipasi menurut gender lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan luar Jawa. Faktor penyebab bias gender pada tingkat SLTP ke atas relatif lebih kecil dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga karena siswa dan mahasiswa yang datang dari keluarga sosial ekonomi tinggi sudah lebih besar proporsinya. Dengan demikian, pengadaan dan distribusi sumber-sumber pendidikan SLTP, SLTA dan perguruan tinggi masih menjadi faktor penting untuk mengurangi bias gender dalam pendidikan.
- 3) Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah karena akses

perempuan juga masih dirasakan dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Perempuan pemegang jabatan struktural, dari tingkatan strategis sampai operasional jauh lebih rendah daripada kurang sensitif gender, yang akan berdampak luas terhadap berbagai dimensi bias gender dalam bidang pendidikan.

- 4) Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembelajaran cenderung bias laki-laki (*male bias*). Fenomena ini dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisannya adalah laki-laki. Penulis buku laki-laki sangat dominan.
- 5) Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan dari sebagian buku-buku pelajaran (khususnya IPS, PPKN, Pendidikan jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya berkaitan dengan konsep keluarga atau peran berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi konsumsi.
- 6) Faktor kesenjangan antar gender dalam pendidikan jauh lebih dominan laki-laki. Khususnya dalam lembaga birokrasi dilingkungan pendidikan sebagai oemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak parah jika parah pemikiran atau pemegang kebijaksaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensitivitas gender.
- 7) Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama disektor swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan menunjukkan

bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik pemerintah maupun swasta, maka salah satunya memilih untuk keluar dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari faktor-faktor bias gender dalam pendidikan.

- 8) Faktor struktural yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi dianggap cocok untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru sekolah dan sebagainya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggapnya memiliki fungsi-fungsi produksi. Laki-laki dianggap berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.

Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah muncul persaingan dengan teknologi yang menggantikan peranan pekerja perempuan dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah.

E. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Keadilan dan kesejahteraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesetaraan gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ada beberapa prinsip dasar yang dipertimbangkan yaitu dasar persamaan pendidikan.

Dasar persamaan pendidikan menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Sebagaimana Athiyah, Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam kerangka ini, pendidikan diperuntukkan untuk semua, minimal sampai pendidikan menengah. Sebab, manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat, sebodoh apapun yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kenijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan, antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki

harus punya hak/kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya sekolah. Hal ini dengan pertimbangan adanya penghambur-hamburan uang sebab mereka akan segera bersuami, peluang kerjanya kecil dan bisa lebih banyak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Pendirian seperti ini melanggar etika Islam yang memperlakukan orang dengan standar materialistik. Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan disamping penghapusan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, bila mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat.

Dengan demikian, pendidikan kerakyatan seharusnya memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga melainkan juga masalah pertanian dan keterampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan hal yang sesungguhnya.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman yaitu kualitas yang baik memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa, berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berusaha meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapat kualitas tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Ungkapan Athiyah tentang kependidikan perempuan seakan menyadari kondisi riil historitas kaum muslimin yang secara sosial perempuan seringkali dirugikan oleh perilaku sosialnya. Seperti gadis-gadis harus putus sekolah karena diskriminasi gender (sebab pernikahan atau hamil diluar nikah) atau karena keterbatasan ekonomi anak laki-laki mendapatkan prioritas utama walau potensinya tidak lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

F. Wanita Dalam Pandangan Islam

Diskursus wanita dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius. Peran dan fungsi wanita menjadi pokok perhatiannya. Pada dasarnya wanita dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surat an-Nisa 1:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya lahir menyebarkan banyak pria dan wanita"

Sebuah hadis mengatakan:

"semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab diatas seorang Ajam (bukan Arab), atau seorang kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria kepada seorang wanita, Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah."

Akan tetapi dalam perspektif yang lain wanita didudukan sebagai obyek yang harus dipimpin laki-laki: *"laki adalah pimpinan bagi wanita"* (An-Nisa 34) bukan berarti wanita tak mendapat kedudukan yang layak. Wanita dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya.

Wanita juga menempati diri sebagai pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat populer lewat sebuah hadits yang menyatakan "surga di bawah telapak kaki ibu". Dalam sistem Islam, wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar:

1. Wanita Sebagai Anggota Umat Beriman

Wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan muamalah, tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan (islah) dalam masyarakat. Memang dalam batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang wanita yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa wanita bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdianya yang luar biasa.

Dengan peranannya tersebut wanita menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi sipiritual, wanita juga mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak.

2. Wanita Sebagai Anggota Keluarga

Kedudukan wanita dalam keluarga menurut Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits: seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata:

menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa? Nabi bersabda, besikap murahlah kepada ayah dan ibumu.

Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam keluarga adalah ibu, baru kemudian ayah. Sebelum kelahiran Islam, seperti yang telah diungkap Quran kelahiran seorang wanita adalah sebuah aib bahkan jika lahir hidup akan dikubur hidup-hidup. Ini tertuang dalam ayat berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَمْسِكُكُمْ عَلَىٰ هُوفٍ ۖ أَم يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“apabila seorang diantara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan. Hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dan orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataupun ia akan menguburkannya ke dalam tanah.” (QS 16:58-59)

Dengan mempertimbangkan kejadian ini, maka Al-quran memberikan jaminan persamaan akan hak hidup anak perempuan:

“dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh... maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya” (QS. 31:8-9)

Dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di keluarga memberikan makna penjagaan syariat. Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini pada

anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. Dari sinilah arti penting wanita dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.

3. Wanita sebagai anggota masyarakat

Peranan wanita dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini di dukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan atau tidak. Dalam bahasan fiqij ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqih muamalah bisa dijalankan dengan rukshah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy, bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman. Hal ini tercermin dalam firma Allah SWT berbunyi:

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (QS. 4:15)

Peranan wanita dalam masyarakat tidak dipisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Keterlibatan wanita dalam masyarakat menurut Darleney May adalah: sebagai agen intelektual, sebagai agen

ketrampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.

G. Upaya Penanggulangan Dampak Negatif Dari Bias Gender Pendidikan Dalam Islam

a. Ibu sebagai pusat pendidikan

Untuk mengembalikan nilai kerakyatan dan kemanusiaan pendidikan. Athiyah berpendapat bahwa pendidikan harus dipusatkan pada ibu. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Sebab, ibu adalah pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Minim sekali orang yang terlepas dari jangkauan ibunya. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu dan dilakukan penuh kasih sayang. padahal inti dari demokrasi tertinggi adalah saat keterbukaan, kerelaan dan persaudaraan telah mencapai tingkat kasih sayang. peran ini adalah pendidikan nonformal yang biasa dilakukan perempuan di rumah.

Presiden Tanzania, Nyerere pernah mengatakan “jika anda mendidik seorang laki-laki, berarti anda telah mendidik seorang person, tetapi jika anda mendidik seluruh orang perempuan berarti anda telah mendidik seluruh anggota keluarga.” Kondisi tersebut tidak bisa diperoleh lewat pendidikan yang meninggalkan nilai persamaan dan kemanusiaan.

Sering dipahami bahwa perempuan didominasi perasaan daripada rasio. Karenanya mereka cenderung sensitif, berbeda dengan laki-laki yang lebih rasional karena yang dominan dirinya adalah rasio sehingga perempuan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi yang melibatkan rasio tersebut. Sebenarnya, kondisi yang sering disalah tafsirkan ini dari sisi kemanusiaan malah menunjukkan sikap sebaliknya, yaitu perempuan memiliki beberapa kelebihan diantanya adakah lebih berperannya hati. Padahal, hati adalah penentu nilai baik-buruk individu. Mereka yang dekat dengan alam, tekun dan teliti. Banyak bidang-bidang yang membutuhkan kelebihan-kelebihan tersebut.

Di samping itu, dengan hati nurani juga seseorang membongkar kemunafikan. Bila hati nurani jernih dan bersih, pasti sesuai dan sama dengan hati nurani bangsa serta rakyat secara keseluruhan. Memang, perempuan cenderung emosional dan sensitif. Karenanya, dengan hati dan kesensitifannya mereka mendapatkan firasat-firasat keibuan yang membuatnya menjadi peka dan memiliki intuisi tajam akan apa yang ada di permukaan dan kasih sayang. hal inilah yang menjadi inti dari kemanusiaan.

Pusat pendidikan pada ibu, dapat memberi kepekaan diatas sebagaimana kata Rukmini, “ibulah yang pertama kali tekun mendidik saya untuk memahami dunia dan kehidupan ini sebagai keutuhan sistem. Beliau selalu mengajak saya bangun pada malam hari melihat bintang dan menjelaskan soal *jagad gede* dan kaitannya dengan *jagad cilik*. Dari beliau saya bisa belajar mengenai bagaimana memahami keberadaan hidup ini dengan cara pandang yang tembus ruang dan waktu.” Dengan kasih sayangnya Rukmini melakukan pembelaan terhadap siapa saja yang lemah dan tertindas. Kepedulian seperti itu tak akan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani.

Upaya lain untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan Islam yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reintrepetasi ayat-ayat Al-quran dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam untuk memenuhi keinginan segelintir orang.
2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan basis kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi.
3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai ditingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4. Pemberdayaan disektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga. Dengan demikian akan menghilangkan ketergantungan ekonomi kepada laki-laki karena salah satu terjadinya marginalisasi pada perempuan adalah ketergantungan ekonomi keluarga kepada laki-laki.
5. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif untuk menghilangkan melek politik bagi perempuan. Karena masih ada anggapan bahwa melek politik itu hanya milik laki-laki dan politik itu adalah kekerasan, padahal sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Dengan demikian kuota 30% sesuai dengan amanah Undang-Undang segera terpenuhi, mengingat pemilih terbanyak adalah perempuan.
6. Pemberdayaan disektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual ditingkatkan, terutama kaum perempuan di pedesaan agar terjadi keseimbangan antara perempuan yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan sama-sama memiliki keterampilan yang relatif bagus.
7. Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dan Rumah Tangga lebih intens dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan arahan dari UUK.

Pendidikan adalah milik dari semua lapisan masyarakat, tidak ada pengecualian disini. Seorang perempuanpun, yang secara Syar'i memiliki keterbatasan-keterbatasan juga wajib untuk menikmati dan memperoleh pendidikan. Sebagian dakwah Nabi SAW "menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua muslim dan muslimat". Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk tidak tersesat pada jurang kejahilan. Siapapun itu dan dalam kondisi bagaimanapun. Kemudian ditegaskan dalam akhir hadits tersebut, bahwa kewajiban menuntut ilmu itu juga tidak hanya bagi kaum Adam dan sich.

Islam membawa nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya. Sejarah berkata, pada masa Yunani, yang mana notabenenya pada

masa itu merupakan masa keemasan peradaban barat, di mata mereka perempuan hanyalah makhluk yang sangat hina, hanya sebagai pemuas nafsu birahi belaka sebagai bentuk penjelmaan syaitan. Pada masa Romawi, perempuan dianggap makhluk yang tidak memiliki ruh, mereka mempermainkannya seperti barang.

Namun, setelah cahaya Islam datang, semua paradigma semacam itu perlahan lenyap. Islam tidak mengenal adanya pembagian kasta atau diskriminasi yang bersifat gender. Tradisi jahiliyah perlahan luntur dan perempuan kembali menemukan prestise. Islam membawa cahaya untuk menerangi seluruh alam. Hingga dalam berbagai kasus juga perempuan mendapatkan porsi yang istimewa dibanding laki-laki, sebagaimana contoh perempuan yang sedang hamil diperbolehkan meninggalkan puasa ramadhan. Hal ini karena memandang aspek pribadi yang ada di dalam diri perempuan.

BAB VII

PRILAKU BULLYING DI SEKOLAH

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kasus akibat kekerasan di sekolah makin sering ditemui baik melalui informasi di media cetak maupun yang kita saksikan di layar televisi. Selain tawuran antar pelajar sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku agresif atau kekerasan yang mungkin sudah lama terjadi di sekolah-sekolah, namun tidak mendapat perhatian, bahkan mungkin tidak dianggap sesuatu hal yang serius. Misalnya bentuk intimidasi dari teman-teman atau pemalakan, pengucilan diri dari temanya, sehingga anak jadi malas pergi ke sekolah karena merasa terancam dan takut, sehingga bisa menjadi depresi tahap ringan dan dapat mempengaruhi belajar di kelas.

Pelaku bullying ini ternyata bukan hanya murid, tapi juga dilakukan oleh guru yang notabene sebagai seorang pendidik yang diharapkan memberikan nilai-nilai edukatif yang lebih bermakna bagi anak didik sebagai generasi penerus bangsa.

B. Kekerasan di Sekolah

Pernahkah kita mendengar kata "kekerasan"? diidentikkan dengan pelaku kejahatan, massa, menghakimi pencuri atau bahkan terorisme. Akan tetapi tahukah kita, bahwa kekerasan pun kerap terjadi di sekolah.

Pada era sekarang, ada kecenderungan yang memperlihatkan kepada kita semua akan meningkatnya kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Jika ditanya

kepada siapapun tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadinya kekerasan, namun fakta berbicara lain, kekerasan terus berlangsung bahkan cenderung meningkat. Ironisnya lagi terjadi dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah/madrasah.

Sekolah/madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif, justru lembaga pendidikan ini ibarat gunung es yang sudah mulai nampak kepermukaan. Akhir-akhir ini para pelajar termasuk mahasiswa banyak tertangkap karena berbagai kasus termasuk kasus bullying.

Bullying merupakan perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Definisi lain *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. *Bullying* sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti ataupun menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual. *Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersiakkannya lebih kuat.

Beberapa asumsi mengemuka, *bullying* terjadi dalam dunia pendidikan tidak selamanya berupa fisik namun juga non fisik dalam bentuk pelanggaran kode etik dan tata tertib sekolah, Asumsi berikutnya lagi, bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Misalnya muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif/sikap, menyebabkan berkurangnya proses memanusiakan manusia dalam rangka

menuju *abdun* dan *khalifah fi ardhi*. Pendidikan mesti menrapkan model pembelajaran, kebijakan (*policy*) dan suasana belajar yang berwawasan damai dan menyandarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Asumsi berikutnya, bahwa kecendrungan *bullying* terjadi disebabkan karena dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat termasuk media massa baik cetak maupun elektronik yang sangat mempengaruhi *life style* manusianya. Refleksi dari pergeseran norma yang sangat cepat, sehingga menimbulkan sikap *instant solution*. Akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi.

Bullying bukan lagi sebuah isu yang dipandang sebelah mata dan diremehkan, bahkan disangkal keberadaannya. Siswa yang menjadi korban *bullying* akan menghabiskan banyak energi untuk memikirkan cara bagaimana menghindari pelaku *bullying* sehingga mereka hanya memiliki sedikit energi untuk belajar. Begitu juga dengan pelaku *bullying*, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan relasi sosial dan apabila perilaku ini terjadi hingga mereka dewasa tentu saja akan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Kenyataan ini kemudian, pihak sekolah yang terkait seperti para pendidik, orang tua dan yang ada di sekolah memiliki andil yang cukup besar dalam mencegah terjadinya tindakan *bullying* dikalangan siswa. Hal ini dilakukan agar siswa-siswa merasa aman dan damai berada di sekolah. Tenaga pendidik dalam kapasitas keilmuan dan pemahaman yang dimiliki dituntut untuk memberikan pengarahan, perlindungan dan intervensi secara dini yang dilakukan secara proporsional dan profesional. Di Indonesia sendiri, perilaku *bullying* belum separah yang terjadi diluar negeri. Untuk itu diperlukan strategi pencegahan yang tepat agar permasalahan *bullying* yang parah tidak terjadi di negeri ini.

C. Konsep *Bullying*

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Berbeda dengan negara lain seperti Norwegia, Denmark dan Finlandia yang menyebut *bullying* dengan sebutan *mobbing* atau *mobbing*. Dalam Bahasa Indonesia, kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Jelas kata asing ini belum familiar ditelinga kita, namun sesungguhnya telah terjadi sejak lama dilingkungan kita.

Pengertian *bullying* banyak yang mendefinisikannya, diantaranya menurut Dan Olweus, seorang pelopor pencegahan *bullying* mengungkapkan bahwa *bullying* adalah *when someone repeatedly and on purpose says or does mean or hurtful things to another person who has a hard time defending himself or herself*.

Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berulang kali dan sengaja kepada orang lain. Novan Ardy dalam bukunya mengungkapkan bahwa *bullying* adalah perilaku negatif yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang.

Selanjutnya menurut Olweus seperti yang dikutip Kathryn Geldard mengemukakan bahwa *Bullying* dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah.

Coloroso dalam bukunya mengartikan *bullying* sebagai suatu penindasan. Ia berpendapat bahwa *bullying* akan selalu melibatkan keempat unsur berikut:

1. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
2. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;
3. Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
4. Teror. Unsur keempat ini muncul ketika *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.

Demikian juga Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2001) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya *bullying* adalah perilaku negatif yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah dan perilaku tersebut terjadi secara berulang-ulang. Suatu perbuatan dikategorikan *bullying*, apabila tindakan kenakalan tersebut sudah terjadi secara terus menerus dan perbuatan itu dilakukan oleh orang

memiliki kekuatan yang lebih. Bullying tidaklah sama dengan *occasional conflict* atau pertengkaran biasa yang umum terjadi pada anak. Konflik pada anak adalah norma; dan membuat anak belajar cara bernegosiasi dan bersepakat dengan sesama teman. Bullying merujuk pada tindakan yang bertujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Sang korban biasanya anak yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku bully.

D. Bentuk-bentuk *Bullying*

Bullying bisa berbentuk langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk langsungnya seperti serangan fisik dan verbal. Sedangkan bentuk tidak langsungnya seperti menyebarkan fitnah atau merusak barang kepunyaan orang lain. Jenis *bullying* yang paling mutakhir saat ini adalah *cyberbullying*, yaitu *bullying* yang menggunakan telepon selular atau melalui internet.

Olweus berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang termasuk *bullying* adalah:

- 1) *Verbal bullying such as calling names and verbal harassment,*
- 2) *Leaving another person out of a group,*
- 3) *Physical bullying such as pushing, hitting, or kicking*
- 4) *Telling lies and spreading false rumors.*
- 5) *Taking away money or other things or damaging personal property.*
- 6) *Threatening or forcing another person to do things they don't want to do*
- 7) *Racial bullying*
- 8) *Sexual bullying*
- 9) *Cyber-bullying (via cell phone or the Internet)*

Dari pendapat Olweus di atas bahwasanya hal-hal yang termasuk dalam tindakan *bullying* antara lain:

- 1) *bullying* dalam bentuk kata-kata seperti memanggil nama dengan tujuan pelecehan.

- 2) mengeluarkan seseorang dari suatu grup.
- 3) *bullying* dalam bentuk fisik seperti mendorong, memukul, atau menendang
- 4) Menceritakan kebohongan dan menyebarkan rumor palsu.
- 5) Menghilangkan uang atau hal-hal lain atau merusak milik seseorang.
- 6) Mengancam atau memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak ingin lakukan.
- 7) mem-*bully* ras tertentu.
- 8) *bullying* seksual.
- 9) Cyber-bullying (melalui telepon seluler atau internet).

Selanjutnya Coloroso mengemukakan bahwa ada 3 bentuk *bullying* yaitu dalam bentuk verbal, fisik dan relasional. Masing-masing bentuk ini dapat menimbulkan dampak buruk masing-masing. Terkadang ketiganya kerap dikombinasikan untuk menciptakan serangan yang lebih kuat.

Bullying secara verbal merupakan bentuk penindasan yang paling umum dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Kata-kata adalah alat yang kuat dan dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. *Bullying* dalam bentuk verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik tajam, penghinaan dan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual.

Bullying secara fisik dapat dilakukan dengan cara memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar serta meludahi anak yang ditindas. Selain itu pelaku menekuk anggota tubuh anak yang menjadi korban, merusak serta menghancurkan pakaian serta barang-barang anak yang ditindas.

Selanjutnya *bullying* relasional merupakan jenis yang paling sulit dideteksi. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui

pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Jenis *bullying* ini dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman dalam pergaulan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, dan tawa mengejek.

Riauskina dkk mengelompokkan bullying ke dalam 5 kategori:

- a. **Kontak fisik langsung** (memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain).
- b. **Kontak verbal langsung** (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-down), mencela/mengejek, mengintimidasi, mengejek, menyebarkan gosip)
- c. **Perilaku non-verbal langsung** (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).
- d. **Perilaku non verbal tidak langsung** (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).
- e. **Pelecehan seksual** (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk bentuk tindakan *bullying* adalah:

- 1) *Bullying* secara verbal
- 2) *Bullying* secara fisik
- 3) *Bullying* dalam bentuk relasional
- 4) Menceritakan kebohongan dan menyebarkan rumor palsu

- 5) Menghilangkan uang atau hal-hal lain atau merusak milik seseorang
- 6) Mengancam atau memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak ingin lakukan
- 7) Mem-*bully* ras tertentu
- 8) *Bullying* seksual
- 9) *Cyber-bullying* (melalui telepon seluler atau internet).

Terjadinya bullying di sekolah menurut Salmivalli dan kawan-kawan merupakan proses dinamika kelompok dan di dalamnya ada pembagian peran.

Peran-peran tersebut antara lain;

- a. **Bully** yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying.
- b. **Asisten bully**, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully.
- c. **Rinfocer** adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya.
- d. **Defender** adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantukorban, sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga.
- e. **Outsider** adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

E. Faktor Penyebab Munculnya Prilaku Bullying

Banyak sekali faktor penyebab mengapa seseorang berbuat bullying. Pada umumnya orang melakukann bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam dan sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi misalnya lingkungan rumah/keluarga yang tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran antara suami istri yang dilakuakn di depan anakanak, atau sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, anak yang terlalu dikekang atau serba dilarang atau anak yang diakukan permisif.

Sementara itu Psikolog Clara Wriswanto dari Jagadnita Counseling mengemukakan bahwa penyebab seseorang menjadi pelaku “bullying” bisa dari berbagai faktor seperti orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, keadaan keluarga yang berantakan sehingga diri anak tersisihkan, atau hanya karena anak tersebut meniru perilaku “bullying” dari kelompok pergaulannya serta tayangan bernuansa kekerasan di internet atau televisi. Sosiolog dari UI, Tamrin Amal Tomagola, mengatakan, kondisi kehidupan sosial setidaknya di kota-kota besar sudah mengidap penyakit frustrasi sosial, tak Cuma itu sistem kehidupan sosial yang dianut saat ini tak lain adult oriental selalu mengakomodasi kepentingan orang dewasa. Selain itu lingkungan sekitar rumah sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku bullying ini, misalnya anak hidup pada lingkungan orang yang sering berkelahi atau bermusuhan, berlaku tidak sesuai dengan norma yang ada, maka anak akan mudah meniru perilaku lingkungan itu dan merasa tidak bersalah.

Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab anak melakukan bullying, misalnya guru yang berbuat kasar kepada siswa, guru yang kurang

memperhatikan kondisi anak baik dalam sosial ekonomi maupun dalam prestasi anak atau perilaku sehari-hari anak di kelas atau di luar kelas bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya. Teman yang sering meledek dan mengolok-olok, menghina, mengejek dan sebagainya.

Faktor lain yang berpengaruh cukup kuat terhadap anak untuk berbuat bullying yaitu adanya tayangan televisi yang sering mempertontonkan kekerasan dalam sinetron atau film atau acara lain seperti acara sidik, berita utama dan lain sebagainya. Bullying adalah sebuah siklus dalam artian pelaku saat ini kemungkinan besar adalah korban dari pelaku bullying sebelumnya. Ketika menjadi korban mereka membentuk skema kognitif yang salah bahwa bullying bias dibenarkan. Bullying juga karena ingin menunjukkan bahwa ia punya kekuatan, atau ingin mendapat kepuasan, iri hati.

F. Dampak Bullying

Menurut Psikolog Ratna Juwita dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, siswa korban “bullying” akan mengalami permasalahan kesulitan dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain dan jarang datang ke sekolah. Akibatnya, mereka (korban bullying) ketinggalan pelajaran dan sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Beberapa hal yang bisa menjadi indikasi awal bahwa anak mungkin sedang mengalami “bullying” di sekolah.

- a) Kesulitan untuk tidur
- b) Mengompol di tempat tidur
- c) Mengeluh sakit kepala atau perut
- d) Tidak nafsu makan atau muntah-muntah
- e) Takut pergi ke sekolah
- f) Sering pergi ke UKS
- g) Menangs sebelum atau sesudah bersekolah
- h) Tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain

- i) Sering mengeluh sakit sebelum pergi ke sekolah
- j) Sering mengeluh sakit pada gurunya, dan ingin orang tua ingin segera menjemput pulang.
- k) Harga diri yang rendah
- l) Perubahan drastis pada sikap, cara berpakaian, atau kebiasaannya
- m) Lecet luka

Beberapa dampak fisik yang biasanya timbul adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, bibir pecah-pecah dan sakit dada. Dampak psikologis yaitu menurunnya kesejahteraan psikologis (psychological well-being).

Dari penelitian Riauskima dkk mengemukakan ketika mengalami bullying korban merasakan banyak emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu dan sedih). Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban bullying seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma (post traumatic stress disorder). Anak yang menjadi korban bullying atau tindakan kekerasan fisik, verbal ataupun psikologis di sekolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan mental di masa yang akan datang. Gejala-gejala kelainan mental yang biasanya muncul pada masa kanak-kanak

Secara umum terbukti anak tumbuh menjadi orang yang pencemas, sulit berkontak sosial, mudah gugup dan takut, hingga tak bisa bicara. Beberapa hal yang menjadi tanda-tanda anak korban bullying :

- a) Kesulitan dalam bergaul
- b) Merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos
- c) Ketinggalan pelajaran
- d) Mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran
- e) Kesehatan fisik dan mental (jangka pendek/jangka panjang) akan terpengaruh

G. Program Intervensi di Sekolah

Lingkungan sekolah memiliki peranan yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran formal, namun juga berfungsi sebagai tempat rujukan dan perlindungan jika siswa mengalami masalah. Oleh karena itu disekolah ditunjuk guru pembimbing untuk menangani dan membimbing siswa dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

Selanjutnya Amirah mengemukakan bahwa proses konseling yang berempati dapat diwujudkan dalam strategi penanganan korban *bullying* yang mungkin menjadi terganggu baik fisik ataupun psikologisnya. Keterampilan berempati terhadap korban *bullying* diperlukan agar klien mau menceritakan kejadian traumatik yang dialaminya. Posisi konselor sebagai orang yang dimengerti dan dapat menjadi pembela bagi diri korban *bullying*, akan dirasa sebagai motivator bagi dirinya. Dengan demikian diharapkan klien mampu membela diri terhadap perilaku *bullying* dimasa yang akan datang. disamping guru mata pelajaran yang juga berperan serta dalam penanganan perilaku bullying.

Ada beberapa ragam pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif dan pendekatan perkembangan. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi agar masalah individu tidak sampai terjadi. Guru memberikan beberapa informasi serta keterampilan untuk mencegah masalah tertentu. Pendekatan preventif tidak selalu didasari oleh teori tertentu yang khusus, namun disesuaikan dengan kebutuhan

Demi tercegahnya masalah *bullying* diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh di sekolah. Sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid, kerja sama antara guru, orang tua dan masyarakat atau pihak lain

yang terkait seperti kepolisian, aparat hukum dan sebagainya. sangat diperlukan dalam menangani masalah ini.

Selanjutnya Ehan mengungkapkan bahwa peran orang tua di rumah juga penting. Orang tua harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan ahlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orang tua. Pemberian teladan kepada anak akan lebih baik dari memberi nasihat.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah ialah membuat sebuah program anti *bullying* di sekolah. Menurut Huneck dalam Ehan yang juga ahli intervensi bullying yang bekerja di Jakarta *International School bullying* akan terus terjadi di sekolah-sekolah, apabila orang dewasa tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan *bullying*, tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh *bullying*, tidak menyadari dampak *bullying* yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada campur tangan secara efektif dari sekolah. Adapun kegunaan dari program serta kegiatan anti bully di sekolah antara lain:

- (1) Menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang
- (2) Membekali siswa untuk membuat keputusan

Beberapa gagasan yang tepat dalam mengatasi fenomena *bullying* disekolah adalah program *peaceful school*. *peaceful school* adalah sekolah yang damai. Sekolah yang memiliki suasana yang kondusif untuk belajar mengajar, memberikan jaminan suasana nyaman dan keamanan pada setiap komponen yang ada disekolah karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan.

Penyusunan program *peaceful school* harus mengandung aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) **Saling percaya**
Jika setiap komponen di sekolah memiliki rasa saling percaya terhadap satu sama lain, maka siswa tidak akan merasa tertekan berada di sekolah. Ketika sekolah mengeluarkan peraturan tertentu, siswa akan percaya bahwa sekolah memiliki itikad baik demi terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar.
- 2) **Kerja Sama**
Kerjasama dapat meredam kecendrungan individu untuk bersikap individualis dan egois dengan mementingkan diri mereka sendiri. Sekolah yang penuh dengan kedamaian dan anti kekerasan memerlukan adanya kerjasama antarkomponen sekolah.
- 3) **Tenggang Rasa**
Tenggang rasa perlu ditanamkan pada siswa disekolah dalam rangka upaya menciptakan budaya damai anti kekerasan di sekolah. Tenggang rasa dapat ditingkatkan melalui peningkatan daya empati individu.
- 4) **Penerimaan terhadap Perbedaan**
Penerimaan terhadap Perbedaan adalah menerima bahwa orang lain juga memiliki pendapat, cita-cita, latarbelakang agama, ras, dan suku bangsa yang mungkin berbeda. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk bertindak secara diskriminatif.
- 5) **Penghargaan terhadap Kelestarian Lingkungan**
Kedamaian sekolah dapat tercipta ketika kelestarian dan keasrian lingkungan sekolah dapat terjaga dengan baik. Kelestarian lingkungan dapat tercipta ketika komponen sekolah memiliki sikap yang berwawasan ekologis.

H. Strategi Pencegahan dan Penanganan untuk Bullying

Beberapa strategi pencegahan dan penanganan tindakan bullying yaitu:

1. Sebuah Drama – *Bullybuster*

Salah satu strategi yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan bullying yaitu dengan menyelenggarakan program drama *Bullybuster*. Program ini dilaksanakan karena keprihatinan akan perilaku bullying yang terjadi di sekolah serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran guru tentang perilaku bullying. Dengan program *Bullybuster* ini, maka diharapkan bahwa murid- murid akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah untuk mengurangi bullying, guru juga melibatkan murid- murid dalam pembuatan peraturan anti-bullying di kelas dan meminta mereka untuk mentaati ikrar anti bullying. Dengan mentaati perjanjian tersebut maka murid- murid setuju untuk tidak membully, untuk menghindari tindakan bullying dan untuk melaporkan tindakan bullying. Beale & Scott melaporkan hasil positif setelah program ini diterapkan yaitu pengurangan angka sebesar 20% dari kejadian bullying di tingkat sekolah menengah serta guru juga menjadi lebih sadar dan lebih banyak murid yang melaporkan kejadian bullying pada mereka.

2. Program pada Sekolah Dasar

Sedangkan program anti bullying yang diadakan di sekolah dasar menggunakan program pengembangan yang bekerjasama dengan personel sekolah. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menyediakan informasi tentang bullying pada murid- murid dan menambah kesadaran dan keterampilan guru dan mempromosikan suasana sekolah yang aman. Program dimulai dengan sebuah komite yang terdiri dari guru, tenaga yang ahli, orang tua, konselor sekolah, dan kepala sekolah. Upaya bersama komite ini menghasilkan 5 nilai inti pada sebuah program edukasi

antara lain penghargaan, tanggungjawab, kejujuran, kerelaan untuk mendengar, dan personal yang baik.

Program ini juga diberikan melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman oleh karena itu staf sekolah bekerja sama membuat lingkungan yang positif bagi program belajar mengajar serta penerapan nilai-nilai dan norma yang serasi dengan peraturan dan konsekuensinya. Selain itu guru juga memberikan latihan budi pekerti kepada siswa untuk saling menghormati satu sama lain, melakukan perilaku positif secara berulang, mengajari keterampilan untuk mengatasi konflik dan menetapkan peraturan dimana siswa diajak untuk memberikan dua komentar positif untuk setiap komentar yang negatif secara langsung pada individu satu sama lain. Cara yang digunakan ini secara langsung telah mengurangi perilaku bullying verbal pada anak yang lebih kecil, dengan mengembangkan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah lain.

3. Peraturan di Wilayah Sekolah

Peraturan di wilayah sekolah yang menyatakan bahwa apabila bullying terjadi dan itu tidak akan ditoleransi sangat penting untuk dikomunikasikan kepada para murid sebagai wujud kepedulian sekolah untuk melindungi mereka dari perilaku bullying. Kebijakan bullying ini haruslah melibatkan administrator sekolah, guru-guru, wakil siswa, orang tua dan anggota komunitas agar lebih berani dalam mencurahkan perhatian pada tindakan bullying, namun kebijakan bullying ini tidak akan menjadi efektif apabila anggota staf tidak sadar pada permasalahan atau tidak familiar dengan kebijakan anti bullying di wilayah sekolah dan tanggungjawab mereka untuk menyelenggarakan kebijakan ini. Selain itu pengawasan yang lebih juga harus dilakukan di luar sekolah dan selama tidak ada kelas karena bullying sering terjadi di luar kelas.

Ratna mendesak pemerintah agar memiliki program yang tegas, jelas dan terarah, kalau kita diam saja, maka itu

sama saja dengan melegalkan tradisi dendam di sekolah tersebut. Dan merupakan bahaya laten yang akan kerap menghantui para siswa sekolah, baik pada generasi ini, dan pada generasi mendatang. Untuk mengatasi dan mencegah masalah bullying diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh di sekolah, sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid, kerja sama antara guru, orang tua dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian, aparat hukum dan sebagainya. sangat diperlukan dalam menangani masalah ini.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sekolah ialah membuat sebuah program anti bullying di sekolah. Menurut Huneck yang juga ahli intervensi bullying yang bekerja di Jakarta International School bullying akan terus terjadi di sekolah-sekolah, apabila orang dewasa tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan bullying, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh bullying, tidak menyadari dampak bullying yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada campur tangan secara efektif dari sekolah. Adapun kegunaan dari program serta kegiatan anti bully di sekolah antara lain:

- a. Menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang
- b. Menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak dapat ditolelir.
- c. Membekali siswa untuk membuat keputusan
- d. Membantu siswa membentuk lingkaran orang yang mereka percayai

Kegiatan yang bisa dilakukan selama program ini antara lain;

1. Brainstorming dan diskusi
2. Kegiatan menggunakan lembar kerja
3. Membaca buku cerita yang berhubungan dengan bullying

4. Membuat gambar, kolase, poster mengenai pencegahan bullying
5. Bermain drama
6. Berbagi cerita dengan orang tua di rumah
7. Menulis puisi
8. Menyanyikan lagu anti bullying dengan lirik yang sudah di rubah dari lagu populer
9. Bermain teater boneka

Beberapa tips untuk mencegah terjadinya bullying, yaitu :

1. Berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pengakuan atas keberadaan dirinya, terlebih pada usia remaja yang sedang dalam masa transisi dan krisis identitas, para remaja lebih senang berkumpul dengan teman-teman sebaya yang menurutnya lebih bisa menerima dan senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu kewajiban kita untuk memberikan alternatif komunitas yang positif dan tetap memenuhi kriteria penerimaan identitas para remaja, misalnya buat perkumplan pecinta alam atau wira usaha yang sesuai dengan keinginannya. Membuat kelompok band, atau kelompok keanekaragaman dan sebagainya.
2. Putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Biasanya budaya bullying diwariskan dengan sistem kaderisasi yang kuat, motivasi senioritas adalah faktor yang terkuatnya. Untuk menghindari gejala tersebut sebaiknya bimbinglah para remaja dengan cara mengadakan kegiatan bersama antara generasi tersebut maupun alumninya dan buatlah suatu ikatan supaya terbentuk jalinan. Persaudaraan yang akan melahirkan kesadaran bahwa senior harus membimbing dan para junior harus menghormati seniorinya.

3. Ajarkan cara mengantisipasi kekerasan bukan melakukannya Latihan bela diri misalnya merupakan salah satu alternatif pembentukan mental spiritual dan jasmani yang kuat ,
4. Tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying Sudah waktunya masyarakat ikut peduli dan melakukan pencegahan atau praktek bullying yang terjadi di lingkungannya

Dukung gerakan diet siaran televisi Batasi anak-anak dan remaja menonton televisi, karena acara dan penamplan yang disiarkan televisi ikut membentuk masyarakat pengaksesnya

Ada beberapa saran bagi anak yang berisiko terkena bullying atau menjadi korban bullying sebagai berikut:

- a) Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan. Merampas, merusak, atau menyandera barang-barang korban adalah tindakan yang biasanya dilakukan pelaku bullying. Karena itu sebisa mungkin jangan beri mereka kesempatan membawa barang mahal atau uang yang berlebihan ke sekolah.
- b) Jangan sendirian. Pelaku bullying melihat anak yang menyendiri sebagai mangsa yang potensial. Karena itu jangan sendirian di dalam kelas, di lorong sekolah, atau tempat-tempat sepi lainnya. Kalau memungkinkan, beradalah di tempat di mana guru atau orang dewasa lainnya dapat melihat Anda akan lebih baik lagi jika anda bersama-sama dengan teman, atau mencoba berteman dengan anak-anak penyendiri lainnya.
- c) Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jika anda tahu ada anak-anak tertentu yang tidak menyukai anda, sebisa mungkin hindari berada di dekat mereka atau di area yang sama dengan mereka.
- d) Jika anda suatu saat anda terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. Jangan perhatikan diri anda seperti orang yang lemah atau ketakutan

- e) Anda harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang anda percayai. Anda harus berani untuk bertindak dan mencoba mengubah kondisi yang salah.. Pihak kepolisian bekerja sama dengan sekolah dengan cara mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dari bullying, dan memberikan sanksi dari mulai yang ringan seperti di skor beberapa waktu sampai dengan pemecatan dari sekolah. Begitu juga kerja sama dengan pihak kehakiman bagaimanakah proses persidangan, tuntutan serta keputusan yang akan dan telah diambil bagi pelaku bullying itu. Bagi pelaku bullying dari pihak guru, sekolah atau pihak- pihak lain jangan ragu-ragu untuk menindak dengan tegas supaya keadilan dapat ditegakkan di negeri ini dan guru tersadar atas semua kesalahannya, sehingga tidak terjadi lagi korban-korban bullying berikutnya.

4. Pentingnya Bimbingan Konseling di Sekolah

Memperhatikan uraian di atas, bahwa dampak bullying sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan mental anak, seperti anak menjadi penakut, hilang rasa percaya diri, menjadi tertekan, malas pergi ke sekolah, hilang konsentrasi sehingga prestasi menurun. Bila melihat kondisi siswa seperti itu fungsi dari pendidikan untuk menyiapkan generasi muda bertanggung jawab terhadap tugasnya di masa yang akan datang seolah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu untuk membangkitkan semangat siswa dari perasaan yang menakutkan dan tampil percaya diri bimbingan dan konseling sangat lah dibutuhkan, supaya potensi mereka berkembang ke arah yang optimal.baik sebagai pribadi maupun sebagai peserta didik yang sedang berada dalam proses perkembangan

Kowitz,G.T mengemukakan tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat diklasifikasikan menjadi tiga,yaitu: *pertama* membantu para

guru dalam mengembangkan keharmonisan di dalam kelas, dengan cara pengakuan dan respek terhadap individu, tepat dalam membentuk kelompok, dan penyesuaian materi pengajaran dengan karakteristik murid; *Kedua*, membantu para guru dalam mempersiapkan kerja sama dengan para murid yang memiliki masalah pribadi, *Ketiga* membantu menjembatani antara anak dengan masyarakat.

Sedangkan Depdikbud, menjelaskan bahwa tujuan layanan bimbingan di sekolah dasar adalah untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas –tugas perkembangan yang meliputi aspek-aspek pribadi, pendidikan dan karir sesuai tuntutan lingkungan. Lebih khusus dijelaskan tujuan masing-masing aspek sebagai berikut: Dalam aspek *perkembangan sosial pribadi*, layanan bimbingan membantu siswa agar:

- a. Memiliki pemahaman diri;
- b. Mengembangkan sikap positif;
- c. Membuat pilihan kegiatan secara sehat;
- d. Mampu menghargai orang lain;
- e. Memiliki rasa tanggung jawab
- f. Mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi;
- g. Dapat menyelesaikan masalah; dan
- h. Dapat membantu keputusan secara baik

Dalam aspek perkembangan pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa agar dapat:

- a. Melaksanakan cara-cara belajar yang benar;
- b. Menetapkan tujuan dan rencana pendidikan;
- c. Mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya; dan
- d. Memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian.

Dengan memperhatikan uraian mengenai tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat dilihat minimal dari dua pihak, yaitu:

a. Pihak Siswa

Dengan kemampuan yang dimilikinya, diharapkan para siswa mampu mencapai:

1. Kebahagiaan hidup pribadi di dunia dan akhirat;
2. Peningkatan kesadaran pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat luas;
3. Pengembangan dan kualitas diri sebagai insan pribadi, sosial, dan insan Tuhan; dan
4. Peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupannya.

b. Pihak Guru

Dengan dilaksanakannya bimbingan dan konseling di sekolah dasar diharapkan para guru mampu mencapai:

- 1) Pengembangan keharmonisan di dalam melaksanakan proses belajar mengajar;
- 2) Keselarasan kerja sama dengan para siswa , terutama dengan mereka yang memiliki masalah pribadi;
- 3) Kerja sama yang lebih intensif dengan orang tua siswa dan masyarakat luas pada umumnya

Selanjutnya Rochman Natawidjaja (1984:64-64), mengemukakan bahwa peran bimbingan seorang guru sebagai penyesuaian nteraksional dala proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai perlakuan guru terhadap siswa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri.
- 2) Sikap positif dan wajar terhadap siswa. Dalam melaksanakan peran bimbingan itu guru tidak menjauhkan die dari siswa, tetapi tidak pula terikat secara sentimentil kepada siswa.
- 3) Perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan.

- 4) Pemahaman siswa secara empatik.
- 5) Penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu.
- 6) Penampilan diri secara asli (genuine) di depan siswa.
- 7) Kekongkritan dalam menyatakan diri.
- 8) Penerimaan siswa secara apa adanya
- 9) Perlakuan terhadap siswa secara permissive
- 10) Kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa dalam membantusiswa untuk menyadari perasaannya itu
- 11) Kesadaran bahwa tujuan mengaja bukan terbatas pada penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, melainkan menyangkut pengembangan siswa menjadi individu yang lebih dewasa.
- 12) Penyesuaian diri terhadap keadaan siswa yang khusus. Penyesuaian perilaku guru terhadap situasi yang khusus adalah sangat penting untuk memperoleh hasil belajar pada diri siswa, sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi, efektifitas mengajar itu sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menyesuaikan diri pada situasi khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka wujud bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar adalah:

- 1) Menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa.
- 2) Menciptakan situasi dan kondisi kelas yang menyenangkan yaitu bebas dari rasa takut dan ketegangan yang menghambat perkembangan siswa
- 3) Menilai keberhasilan belajar siswa dan memberikan layanan perbaikan pengajaran yang berkaitan dengan bidang studi yang diajarkannya
- 4) Memahami dan melaksanakan kebijaksanaan dan mekanisme kerja bimbingan yang berlaku di sekolahnya

- 5) Memberikan layanan orientasi dan informasi yang berkaitan dengan masalah kelanjutan pendidikan dan jabatan yang akan siswa hadapi
- 6) Membantu siswa untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan pengajaran yang diajarkannya dan program pendidikan yang ditempuh para siswanya
- 7) Memperlakukan siswa sebagai pribadi yang memiliki harga diri, dengan memahami kelemahan, kekurangan, dan masalah-masalahnya
- 8) Memberikan layanan konsultasi secara terbatas pada masalah-masalah kesulitan yang berhubungan dengan pengajaran yang diajarkannya atau pemilihan kelanjutan pendidikan dan pekerjaan yang dimasukinya
- 9) Memberikan layanan referral bagi individu yang memiliki masalah atau kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh guru
- 10) Memberikan dorongan untuk meningkatkan dan mengembangkan intelektual, personal dan sosial siswa.

Menurut Winarno Surakhmad (1986:61-68) terdapat minimal empat kemampuan utama yang harus dimiliki seorang guru yaitu:

- 1) Mengetahui setiap murid yang dipercayakan padanya. Bukan saja menenal sifat dan kebutuhan murid-murid itu secara umum sebagai sebuah kategori, bukan saja mengetahui jenis minat dan kemampuan yang dimiliki oleh murid-muridnya, bukan saja mengenai cara-cara manusia pada umumnya belajar, tetapi juga mengetahui secara khusus sifat, kebutuhan, minat, pribadi, serta aspirasi setiap murid.
- 2) Memiliki kecakapan bimbingan. Sesungguhnya mengajar merupakan satu bentuk bimbingan yang banyak berpusat pada kemampuan intelektual, guru

perlu memiliki pengetahuan yang memungkinkan ia menetapkan tingkat perkembangan setiap anak didiknya, baik perkembangan itu menyangkut emosinya, minat dan kecakapan khusus, maupun dalam prestasi-prestasi skolastik, fisik, dan sosial, dengan pengetahuan ini seorang guru dapat membangun sebuah rencana atas dasar perkembangan itu sehingga murid-murid benar-benar mengalami pendidikan yang menyeluruh dan integral.

- 3) Memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan di Indonesia pada umumnya sesuai dengan tahap-tahap pembangunan. Dengan pengetahuan ini guru akan lebih mudah untuk memahami kebutuhankebutuhan muridnya dan membantu dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan mereka.
- 4) Memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkannya. Kesadaran yang tinggi seorang guru dalam mengantisipasi laju pembangunan ilmu dan teknologi, akan memudahkan bagi dirinya dalam menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu dan masyarakat di masa mendatang.

Secara lebih rinci, bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan tingkat pertama ditujukan untuk mengatasi permasalahan, seperti tercantum dalam kurikulum 1975 (dikutip dari Mapiare, 1984: 292-293).

1. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri.
2. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas.
3. mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi.
4. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakat dalam bidang pendidikan dan kemungkinan pekerjaan secara tepat.

Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan tingkat atas secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri yang berkaitan dengan (a) pengetahuan yang dicapai bagi kelanjutan studi, (b) keterampilan yang dicapai bagi jabatan pekerjaan, (c) sikap yang dimiliki bagi komunikasi dalam hubungan sosial.
2. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan sekolah kini dan prospek mendatang.
3. Mengatasi kesulitan dalam menguasai pengetahuan tuntutan sekolah.
4. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan berbagai jenis karir dan lapangan kerja kini dan prospek mendatang.
5. Mengatasi kesulitan dalam menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang dituntut suatu jenis karir dan lapangan kerja.
6. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan lingkungan sosial (orangtua, calon pasangan hidup, masyarakat sosial, masyarakat luas) kini dan prospek mendatang.
7. Mengatasi kesulitan dalam menguasai sikap-sikap hormat dan penghargaan yang diharapkan lingkungan sosial tertentu.
8. Mengatasi kesulitan dalam membuat keputusan arah pilihan kelompok mata pelajaran bagi kemungkinan kelanjutan studi, atau kemungkinan karir dan jabatan-pekerjaan, dan arah pilihan bagi kemungkinan calon pasangan hidup, serta dalam mengadakan penyesuaian dengan orangtua, masyarakat sekolah, dan masyarakat luas.

Bantuan mengoptimalkan perkembangan berarti membantu individu mengatasi, memecahkan hambatan, kesulitan, ancaman yang dihadapi, selain itu bantuan juga ditujukan supaya pada diri siswa terdapat perubahan menuju kondisi yang lebih baik, lebih sempurna. Bimbingan konseling juga perlu diberikan kepada pelaku bullying baik sebagai siswa yang menganggap dirinya lebih senior atau lebih

berkuasa, dan juga kepada guru-guru yang secara tidak sadar telah melakukan bullying terhadap siswa seperti yang jelas-jelas kelihatan secara fisik maupun secara verbal atau non verbal yang dampaknya lebih fatal dirasakan oleh anak. Selain itu juga bimbingan konseling hendaknya diberikan kepada orang tua yang lebih banyak bergaul dengan anak, sehingga orang tua lebih paham apa yang semestinya diberikan kepada anaknya. Bimbingan juga perlu diberikan kepada masyarakat supaya mengetahui bagaimana cara mendeteksi perlakuan bullying sehingga tidak terjadi kekacauan dan keresahan pada lingkungannya dan lebih jauh bisa menghindarkan korban bullying yang merugikan warganya.

5. Intervensi dalam Bimbingan Konseling

Dalam rangka menanggulangi bullying di sekolah perlu ada upaya-upaya bimbingan konseling yang terintegrasi. Pelaksanaan pemberian bimbingan konseling kepada siswa sebagai pelaku dan penderita bullying . atau guru-guru dan staf sekolah sebagai pelaku bisa dengan konseling kelompok atau konseling individual.

Bimbingan kelompok diberikan kepada semua individu (siswa), sebagai upaya tidak langsung dalam merubah sikap dan perilaku siswa melalui penyajian informasi yang teliti, atau menekankan dorongan untuk unruk berfungsinya kemampuan- kemampuan kognitif. Selain itu bisa menggunakan media elektronik seperti pemutaran film tentang proses terjadinya bullying dan dampak terhadap kehidupan seseorang penderita bullying. Pendekatan bimbingan konseling yang digunakan dalam mengatasi bullying di sekolah ini, bisa dengan menggunakan pendekatan eklektik yaitu suatu pendekatan yang terintegrasi seperti pendekatan Perilaku, pendekatan berpusat pada pribadi, pendekatan Transaksi Analitis , humanistik dan sebagainya.

Pendekatan perilaku digunakan dalam konseling kelompok untuk mengatasi bullying, asumsinya bahwa perilaku, kognisi dan perasaan bermasalah itu terbentuk karena dipelajari. Oleh karena itu semua dapat dirubah dengan suatu proses belajar yang baru. Pendekatan perilaku bisa mengintervensi dari teori belajar sosial (sosial-learning theory), seperti penguatan kembali, (reinforcement), pemberian contoh (modeling), pembentukan, penataan kembali kognisi, latihan santai (relaxation) dan sebagainya, Penguatan kembali (reinforcement), bisa dilakukan oleh guru-guru atau teman-teman supaya klien tampil percaya diri. Teknik ini bisa dilakukan sendiri bagaimana menguatkan diri sendiri dan meningkatkan kemampuan mengelola diri dan tidak tergantung pada orang lain. Pemberian contoh merupakan alat yang sangat kuat, karena secara tidak langsung anak akan meniru dan melihat apa yang dilakukan oleh guru atau teman-temannya, misalnya bagaimana guru menghargai pendapat siswa walaupun salah, atau menghargai karyanya, siswa diajarkan untuk saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi.

Penataan kembali kognisi (cognitive restructuring), adalah proses menemukan dan menilai kognisi seseorang, menemukan dampak negatif pemikiran tertentu terhadap perilaku, dan belajar mengganti kognisi tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis dan lebih cocok.

Pendekatan Berpusat pada pribadi (person-centered approach), didasari asumsi bahwa manusia cenderung bergerak ke arah keseluruhan dan perwujudan diri. Menurut Rogers bahwa individu-individu di dalam dirinya memiliki sumber daya yang luas untuk memahami dirinya sendiri dan untuk mengubah konsep dirinya. Oleh karena itu konselor bersifat menghargai tanpa syarat, empati dan keaslian.

Pendekatan Ekstensial Humanistik berasumsi bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang

meungkinkan manusia mampu berfikir dan memutuskan. Teknik yang digunakan: kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab, keterpusatan dan kebutuhan orang lain.

Pendekatan Analisis Transaksional, berasumsi bahwa orang-orang bias belajar mempercayai dirinya sendiri, berfikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan mengungkapkan perasaannya. AT berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan tiga pola tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah yaitu orang tua, orang dewasa dan anak. Kemudian berpendapat bahwa manusia memerlukan belaian baik secara fisik maupun emosional, jika belaian tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan berkembang secara sehat. Oleh karena itu seorang konselor harus berperan memberikan perhatian pada masalah-masalah emosional dan berperan sebagai guru, pelatih, atau nara sumber yang penuh kasih.

6. Metode Intruksional

Guru memegang peranan penting dalam program pencegahan dan intervensi bullying di sekolah karena guru yang paling banyak menghabiskan waktu bersama siswa sehari-hari. Guru seharusnya tidak menolak atau mengacuhkan laporan siswa tentang bullying jika tujuan mereka untuk mencegah atau mengurangi perilaku bullying. Guru harus menanggapi setiap laporan dengan serius. Mendiskusikan peraturan bullying di kelas dan menciptakan suasana kelas yang baik untuk ruang diskusi, hal ini merupakan metode yang baik untuk mengurangi tindakan bullying. Dengan mentaati peraturan yang berlaku di kelas maka siswa membantu penyelenggaraan pencegahan/intervensi bullying di kelas dan siswa akan menyadari tentang perilaku bullying lebih jelas dan mereka juga dapat efektif membantu dalam menyelenggarakan peraturan sekolah dan kelas. Metode intruksional dan aktivitas ini dapat digunakan untuk membantu siswa mengerti tentang bullying terlebih untuk menyediakan kesempatan bagi mereka untuk memperluas

lingkaran social mereka dan mempraktikkan perilaku yang baru.

I. Penanganan Bullies Dan Korban

1. Penanganan Korban

Untuk menangani korban sebaiknya anggota sekolah dan orang dewasa lainnya harus berkomunikasi dengan jelas pada korban bullying bahwa mereka tidak bersalah dan mereka tidak berhak mendapatkan bullying sebagai pengalaman mereka. Intervensi pada bagian ini dapat membantu siswa mengenali kelebihan personal dan kepandaian dan mereka akan merasa lebih bangga dan percaya diri. Menambah kemampuan social juga dapat mengurangi kesempatan korban untuk dibully. Dukungan juga harus diberikan oleh anggota sekolah kepada korban agar korban lebih mampu mengembangkan sikap terhadap bullying.

2. Penanganan Bullies (Pelaku Bullying)

Suatu jenis kemampuan direkomendasikan untuk bullies untuk membantu mereka belajar cara yang baru untuk berinteraksi dengan yang lain, salah satunya adalah dengan membantu bullies untuk belajar mengendalikan emosi pada diri mereka sendiri dan orang lain dan untuk menjadi lebih peduli pada sudut pandang orang lain. Self-control yang sebaiknya dilakukan adalah pengaturan diri, penguasaan amarah, penanganan konflik. Dengan pengendalian diri maka bullies dapat berpikir dan menenangkan diri sebelum bertindak reaktif seperti memukul atau menendang.

Pada intinya korban dan bullies membutuhkan training keterampilan social untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial agar mereka dapat diterima dalam pergaulan dengan teman sebaya dan mengembangkan pertemanan, selain itu mereka juga membutuhkan dukungan dari orang dewasa terdekat seperti orang tua atau guru untuk

memberikan bimbingan agar dapat berkembang secara normal.

3. Orang Tua

Clara menghimbau para orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan menyadarkan sang anak bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Orang tua dapat memberikan banyak dukungan selama pengembangan dan pelaksanaan dari program pencegahan dan penanganan bullying. Penyediaan informasi yang kritis bagi semua orang tua tentang kebijaksanaan sekolah untuk menambah dukungan dari orang tua. Serta membangun hubungan yang dekat dan terbuka dengan orang tua sehingga dapat bekerjasama dengan orang tua dalam mengarahkan siswa.

Peran orang tua di rumah harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan ahlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orangtua. Pemberian teladan kepada anak akan lebih baik dari memberi nasihat.

BAB VIII

FAKTA HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak semakin marak baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemberitaan diberbagai media massa baik cetak maupun elektronik sudah menyentak hati kecil manusia untuk melakukan pencegahan. Perdagangan manusia bukanlah sesuatu hal yang baru di muka bumi ini. Seharusnya perbudakan termasuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak hilang dan sirna seiring dengan perkembangan zaman modern. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan secara yuridis banyak ditentang diberbagai negara.

Perempuan /anak korban *trafficking* diperlakukan dan seperti barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali. Fenomena yang mendua ini semakin tumbuh dan berubah-ubah dalam bentuk dan kompleksitas. *Trafficking* anak dan perempuan untuk tujuan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan individu korban, keluarga, masyarakat, dan merupakan kekerasan HAM. Oleh karena itu kejahatan ini harus diperangi secara gigih oleh semua pihak.

B. Konsep, asal usul dan perkembangan *Human Trafficking*

Beberapa batasan definisi tentang *trafficking* diberikan diantaranya:

1. *All acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for work or services by means of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion (UN Special Rapporteur on Violence Women)*

(Segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak di dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan-pemerangkapan, hutang, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).

2. Perserikatan bangsa-bangsa tahun 1994 mendefinisikan *trafficking* sebagai pergerakan dan penyeludupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional, kebanyakan dari negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi terobsesi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyeludup, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diseludupkan dan adopsi palsu.
3. Resolusi Senat Amerika Serikat No.82 tahun 1998 menyatakan bahwa *trafficking* adalah satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan,

penyiksaan, buruh paksa, atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan hak-hak asasi manusia. *Trafficking* memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan, dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiksaan, kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.

4. Persatuan bangsa-bangsa tahun 2000 menyatakan bahwa *trafficking* sebagai:

“trafficking in person is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation forced labour or services, salvery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa perdagangan manusia dimulai dari perekrutan, pengiriman, penampungan atau hingga penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan untuk tujuan eksploitasi. Termasuk eksploitasi adalah melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbagai bentuk perbudakan,

dan penghambaan atau pengambilan organ tubuh maupun penyewaan rahim dengan paksa.

Pada tahun 1995, Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing merumuskan *trafficking in women* sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan dan anak perempuan diseluruh dunia. Adapun yang termasuk eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi, tetapi juga pornografi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Termasuk juga didalamnya kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan, *incest*, pengebirian atau perusakan genital serta pelecehan seksual.

Nampak dari definisi di atas bahwa ada aspek kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pihak dan orang yang mengambil keuntungan, serta ingin mempertahankan praktik perdagangan perempuan. Tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi. Untuk sampai kearah itu, jalan perekrutannya acap kali disamarkan dengan iming-iming pekerjaan tertentu seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga diluar negeri.

Inti dari *trafficking* adalah eksploitasi dalam hal pelacuran baik dialamatkan kepada perempuan atau anak-anak. Eksploitasi dalam bentuk ini sudah ada sejak manusia itu ada. Meskipun pandangan masyarakat berbeda-beda.

a) Modus Operandi Trafficking

Trafficking adalah bisnis ketiga paling menguntungkan didunia setelah senjata dan narkoba, serta merupakan kegiatan yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menjual senjata atau barang-barang adiktif. Para korban *trafficking* umumnya dijadikan pekerja seks

komersial (PSK), pekerja/buruh murah, pembantu rumah tangga, pengemis yang diorganisir, pengedar narkoba, pekerja ditempat hiburan, konsumsi pengidap pedofilia, pengantin pesanan, dan donor paksa organ tubuh. Modus operandi rekrutmen biasanya dengan bujuk rayu, janji pekerjaan dengan gaji besar, duta seni, pertukaran pelajar, kawin kontrak, pengiriman tenaga kerja, adopsi anak dengan golongan darah tertentu, kemudian baru diketahui yang dibutuhkan adalah organ tubuh anak itu untuk keperluan transplantasi anaknya sendiri serta lainnya.

Banyak agen perekrut yang tidak memiliki izin beroperasi diseluruh negeri terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia pada berbagai tingkatan. Ada agen perekrut seringkali mengenakan uang jasa yang luar biasa besarnya sehingga menyebabkan calon pekerja terlilit hutang dan orang-orang yang direkrut ini bekerja secara ilegal diluar negeri, sehingga menambah kemudahan pekerja ini jadi korban perdagangan manusia dan pelecehan lainnya.

b) Kondisi *Trafficking* di Indonesia

Di Indonesia, korban trafficking sering kali dipakai sebagai pekerja yang diperas (dengan tempat kerja dan kondisi upah kerja yang buruk), pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penghibur "*live*" pengantin pesanan, buruh atau pekerja anak, pengemis jalanan, disamping mereka yang secara tradisional dilihat sebagai pekerja prostitusi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa setiap orang dapat saja terjerumus menjadi korban dari pelaku *trafficking*, tetapi korban biasanya berasal dari lingkungan yang miskin, pedesaan dan yang tidak memprioritaskan pendidikan. Perempuan dan anak yang menjadi buruh migrant dan atau etnis minoritas dan kelompok lain yang terpinggirkan mempunyai resiko yang lebih besar.

Meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah orang Indonesia yang mengalami *trafficking*, dengan mengombinasikan berbagai sumber diperkirakan ada

delapan juta anak dibawah usia 15 tahun yang bekerja di Indonesia. *Trafficking* di Indonesia mempunyai dua bentuk; domestic dan internasional, bentuknya misalnya anak dan perempuan dijadikan pelacur, dipekerjakan di jermal (penangkapan ikan ditengah laut), pengemis, PRT dengan jam kerja panjang, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat terlarang, dan menjadi korban pedofilia.

Berbagai bentuk kekerasan *trafficking* dialami diantaranya, yaitu kekerasan fisik, mental dan seksual. Kekerasan fisik terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti secara fisik. Sedangkan secara mental (*mental abuse*) merupakan suatu tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain, membuat individu tersebut sakit atau terganggu perasaannya atau membuatnya memperoleh perasaan yang tidak enak (*feels uncomfortable*). Adapun kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah segala pelanggaran seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain yang secara syah bertanggung jawab untuknya yang meliputi; menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan hubungan seksual terhadap anak, pornografi, atau mengizinkan anak melakukan hubungan seksual.

c) Penanganan terhadap pelaku Trafficking

Pada dasarnya manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan persamaan hak didepan hukum, hak reproduksi dan lain-lain. Berikut ini upaya-upaya untuk menghapus praktek *trafficking*:

1. Tingkat internasional

Kasus-kasus *trafficking* anak dan perempuan untu tujuan seksual terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas

batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara tetangga sekitar Indonesia. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang harus dibasmi sampai keakar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya. Ada empat instrument internasional atau regional yang dapat digunakan untuk mengatasi *trafficking* yaitu:

- a. Pertama, “Konvensi Hak Anak (KHA)”, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tertanggal , 25 Agustus 1990;
- b. Kedua, “Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm”, disepakati pada tahun 1996.
- c. Ketiga, “Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik Melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak” (*Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Paific Region Againt Commercial Sexual Exploitation of Childrens*). Instrumen ini ditandatangani di Bangkok pada bulan Oktober 2001; dan
- d. Keempat, “Komitmen Global Yokohama”, disepakati pada bulan Desember 2001.

Instrumen pertama dan keempat, memberikan landasan legal dan moral, sedang instrumen kedua dan ketiga, selain memberikan landasan moral juga memberikan kerangka program bagi upaya Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (EKSA), baik di tingkat internasional dan regional maupun nasional dan lokal. Kerangka yang diberikan oleh Agenda Aksi Stockholm serta Komitmen dan

Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak terbagi menjadi lima kategori yakni:

- i. Koordinasi dan kerjasama;
- ii. Pencegahan;
- iii. Perlindungan;
- iv. Pemulihan dan reintegrasi; dan
- v. Partisipasi anak.

Selain merujuk pada empat instrumen sebagaimana disinggung dimuka, rencana aksi ini juga berkait dengan kesepakatan Indonesia terhadap tiga instrumen internasional lainnya, yakni:

- a) Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2000). Untuk itu telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b) *Option Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of The Child Prostitution and Child Pornography* (ditandatangani oleh Indonesia pada 24 September 2001), dalam kaitan ini kiranya disusun pula Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2002; dan
- c) *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing to The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (ditandatangani oleh Indonesia pada 12 Desember 2002), dalam kaitan ini disusun pula Rencana Aksi

Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2002.

2. Tingkat Nasional

Selain berkaitan dengan berbagai instrumen internasional atau regional tersebut, perkembangan yang terjadi di tingkat nasional telah memberikan landasan baru bagi upaya penghapusan terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan *Trafficking* Anak.

Jaminan terhadap anak Indonesia yang termarjinalkan dijabarkan para pendiri Republik Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 34 yang dinyatakan, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Pada tahun 1974 Indonesia memiliki UU No. 9 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan siapa yang disebut dengan anak-anak, hak anak-anak, tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan cara-cara yang patut dikembangkan untuk menanggulangi permasalahan anak.

Lahirnya UU No. 9 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah peduli terhadap hak-hak anak jauh sebelum masyarakat dunia sepakat melahirkan Konvensi Hak Anak (KHA) tanggal 25 November 1989. Namun demikian kepedulian tersebut belum dapat menjadi jaminan bagaimana implementasinya dalam bentuk-bentuk program nyata untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan anak, khususnya eksploitasi seksual komersial.

Dalam hal Konvensi Hak Anak (KHA), pemerintah Indonesia telah meratifikasinya pada tanggal 25 November 1990 melalui Keputusan

Presiden No. 36 Tahun 1990. Keputusan politis untuk mengadopsi kesepakatan internasional itu relatif cepat dilakukan pemerintah Indonesia, namun sosialisasi dan aksi nyata di lapangan seringkali tidak seperti yang diharapkan. Sehingga permasalahan anak tidak segera tertangani. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya Indonesia dalam lapis ketiga oleh Departemen Luar Negeri AS pada Juni 2002. Predikat ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melakukan upaya penting untuk mencegah dan menaggulangi masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Implementasi di Indonesia terhadap komitmen global dalam rangka menentang ESKA tercermin dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam Keppres ini ESKA menjadi salah satu masalah yang ditekankan. Pada tanggal 20 Desember 2002 Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Kepres yang secara spesifik mengatur penghapusan ESKA, yaitu (1) Kepres No. 87 tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan (2) Kepres No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Ketiga Kepres yang berkaitan dengan Penghapusan ESKA tersebut diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menerangkan secara komprehensif perlindungan terhadap tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental spiritual meliputi komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fisik dan non fisik, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, seksual dan kekerasan di ruang domestik maupun ruang

publik. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Republik Indonesia dibantu dengan UNICEF telah sepakat mewujudkan secara nyata amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kaitannya dengan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui program kerjasama di tingkat nasional tertuang dalam dokumen *Master Plan of Operations* (MPO) periode 2001-2005, dengan tema “Bekerja Bersama untuk Mewujudkan Hak Anak dan Perempuan”. Tujuan umum program kerjasama ini adalah mendukung diwujudkannya hak anak dan perempuan, serta memaksimalkan potensinya untuk membangun sumber daya manusia sejak dini. Dalam skala internasional, kerjasama ini merupakan wujud dari komitmen untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990, serta penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1984.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF pada MPO, telah ditandatangani program kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam *District Cooperation Agreement* (DCA) antara Bupati dan Walikota dengan kepala perwakilan UNICEF Indonesia dengan diketahui oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Tujuan khusus program ini antara lain meningkatkan upaya pemeliharaan bagi kesejahteraan anak dan perempuan melalui sistem pelayanan berbasis keluarga dengan penekanan stimuli dini pada anak, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia sekolah,

meningkatkan perlindungan sosial dan hukum bagi anak usia 0-18 tahun yang beresiko terhadap semua bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan penelantaran.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelacuran di Indonesia dalam KUHP, sebagai peraturan pokok dalam hukum pidana, terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekerasan dan perlakuan seksual terhadap anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 287

1. Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum mencapai dua belas tahun jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

b. Pasal 288

- (1) Barang siapa seseorang yang bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mendapatkan luka

- berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun;
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana selama-lamanya dua belas tahun.
- c. Pasal 290
- Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa orang itu belum pantas dikawini;
- (2) Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul atau untuk berzina dengan orang lain.
- d. Pasal 292
- Orang yang sudah dewasa, yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- e. Pasal 293

- (1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian, akan memberi uang atau barang dengan sudah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau memberdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya patut dapat disangkanya dibawah umur, maka melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana penjara selama-lamanya lima tahun;
 - (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu kepadanya.
- f. Pasal 294
- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya, atau dijaganya, atau bujangnya atau bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- g. Pasal 297
- Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Di samping ketentuan pasal-pasal KUHP di atas, dalam pasal 297 juga berkaitan dengan hal menyediakan tempat, memberikan informasi dan fasilitas untuk perbuatan pelacuran yang di masyarakat dikenal “germo”. Sementara terhadap wanita-wanita penjual jasanya di samping Pasal 297 di atas yang berkaitan dengan hal yang dilakukan di tempat tertentu (lokalisasi), juga ketentuan Pasal 281 apabila dilakukan di pinggir jalan atau tempat hiburan.

Bagaimana dengan pria hidung belang yang memakai jasa wanita tersebut di atas, maka akan sulit sekali dijerat dengan ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut berlaku dalam hal pelakunya adalah pria yang telah kawin. Dalam hal ini si pelaku dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP (perzinahan) dengan catatan ada pengaduan dari istrinya. Apabila pria tersebut kawin maka hanya dapat dihukum apabila ada pembuktian; (1) adanya paksaan; (2) wanita belum cukup umur. Namun dalam kenyataannya penegakan KUHP terhadap kasus pelacuran dan permasalahan *law enforcement* -nya, dalam pelaksanaan ketentuan KUHP tersebut di atas tidak sesederhana sebagaimana menguraika ketentuan pengaturannya. Aktualisasi dan *law enforcement* kasus-kasus pelacuran dan kesusilaan pada umumnya mempunyai berbagai kendala baik yang bersifat yuridis maupun sumber daya manusia dari penegak hukum dan kondisi sosial kultur yang tidak kondusif.

3. Tingkat Lokal

Pada tataran Peraturan Daerah (Perda), pemerintah daerah sudah seharusnya menerbitkannya untuk mengikat dan mengimplementasikan peraturan yang konsideran

baik tingkat internasional maupun nasional. saat ini di beberapa daerah sudah banyak yang menerbitkan peraturan daerah (perda) misalnya di Kabupaten Indramayu, Kota Surakarta dan daerah lainnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1999 tentang prostitusi, dengan ketentuan umum yang dimaksud prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Peraturan daerah menyangkut prostitusi yang berlaku di Surakarta merupakan peraturan yang sudah sangat tua, yaitu berupa Perda No. 7 tahun 1979 tentang Wanita Tuna Susila. Baik perda yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Indramayu maupun Kota Surakarta, sama sekali belum menyebutkan pembatasan usia, baik pelaku maupun korban prostitusi kaitannya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak (penduduk laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah umur 18 tahun).

Meskipun tertulis pada Bab II, Pasal 5 yang berbunyi : “Siapapun di jalan umum atau di tempat yang kelihatan dari jalan umum atau di tempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda untuk melakukan perbuatan prostitusi. Siapapun yang kelakuan atau tingkah lakunya dapat menimbulkan pandangan bahwa ia pelacur, dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah, di penginapan, di losmen, horel, asrama, rumah penduduk, kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendara bergerak kian kemari.”

Sementara itu, Kota Surakarta pada tahun 2005 telah menerbitkan kembali Peraturan Daerah yang berkenaan dengan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, sekaligus berfungsi mengganti Perda No. 7 tahun 1979 tentang Wanita Tuna Susila.

Keberadaan anak yang diperdagangkan (*trafficking*) untuk dilacurkan sangat kurang perhatian dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara umum. Seringkali anak yang dilacurkan dianggap sebagai pekerja seks komersial dewasa (pekerja seks komersial).

Kurangnya perhatian terhadap keberadaan anak yang ditrafik untuk dilacurkan dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain belum dipahaminya konsep atau definisi anak oleh berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan anak, stakeholder, maupun masyarakat secara luas. Konsep anak yang dipakai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum tersosialisasikan secara baik, sehingga Undang-Undang, peraturan, kebijakan, program dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menyangkut anak masih sangat kabur. Fenomena seperti ini dijumpai diberbagai daerah seperti Indramayu, Surakarta, Semarang, Jakarta dan diperkirakan juga terjadi secara nasional.

Sementara itu penyediaan perangkat hukum yang memadai baik skala internasional, regional, nasional bahkan lokal menjadi sebuah keharusan. Di samping penegakan hukum (*law enforcement*) oleh para penegak hukum yang dimaksudkan untuk mengatur laju pergerakan jaringan prostitusi anak. Bentuk-bentuk tindakan yang diperlukan dalam penegakan hukum ini termasuk diantaranya pemberian sanksi terhadap tamu dari anak-anak yang dilacurkan dan jaringan yang mendapatkan manfaat

dari industri seks anak-anak, razia atau penjarangan yang disertai tindak lanjut yang konkrit dan penertiban izin perhotelan.

Dalam hal ini juga diperlukan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak dan anak-anak yang dilacurkan. Beberapa kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, Keppres No. 59 tahun 2002 mengenai RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres No. 87 tahun 2002 mengenai RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Kepres No. 88 tahun 2002 mengenai RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arief Rahman, *Homeschooling: Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku*, Kompas, Jakarta, 2007

Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insan, 2008

Abd. Rahman Assegaf, MA, Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004

Astuti, M, Indati, A dan Sastriyani, *Bias gender dalam buku pelajaran bahasa Indonesia*, Jurnal Gender, Vol 1, 1999

Alamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam: Upaya memahami seluruh konsep Islam secara mudah*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989

Amirah Diniaty, *Keterampilan Empati Dalam Penyelenggaraan Konseling Pasca Traumatik Untuk Korban Bullying Di Sekolah Menengah*. Prosiding International Seminar & Workshop Post Traumatic Counseling, 2012

Anomim, *Human Right in Practice: A Guide To Assist Trafficked Women and Children*, Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1999

Athiyah al-Abrasyi, `Adhamat al-Rasul SAW, Mesir: Dar al-Qalam, 1965

Ali Mohamad dan Asrori Mohamad, (2006). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Barbara Coloroso, *Stop Bullying*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007

Booth, T. and Ainscow, M. *Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in School*, London: CSIE. 2002

Corey Gerald, *Teori dan Praktek Konseling Psikoterapi*. Bandung : Refika Aditama. 2007

Daymond and Holloway, *Qualitative Research Methods in Public Relation and Marketing Comunication*. Diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, *Metode Riset Kualitatif dalam Publik Realtion dan Marketing*, Yogyakarta: Bentang, 2008

Ehan, Bullying dalam pendidikan, Makalah

Faizah Fahmi, *Pertukaran Sosial dalam interaksi sosial orang tua dan guru untuk memaksimalkan proses pembelajaran anak (studi di SDIT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)*, Tesis, UNP-Padang, 2009

Furqon, *Konsep dan Aplikasi Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar*. Bandung: 2005

International Journal of Disability, Development and Education, 52, 1, 59-68.

Stubbs, S. *Inclusive Education Where There are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance, 2002

J.David Smith, *Inclusion, School for All Student*(Wadsworth Publishing Company), Terjemahan: Denis, Ny.Enrica, Nuansa, Bandung, 2005

Golis, S. A. at al, *Inclusion in Elementary Schools: A Survey and policy Analysis. A peer-reviewed scholarly electronic Journal, education policy Analysis archives*. 3,15. 1995

Kwon, H. *Inclusion in South Korea: The current situation and future directions*, 2005

Kathryn Geldard, *Konseling Remaja, Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Layne, marty, *Ibuku Guruku (belajar di rumah dalam balutan kearifan dan kehangatan*, Bandung, MLC, 2005

Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.4, No.3 Oktober 2006:Jogja: PSW UIN Sunan kali Jaga, 2006

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994

Miles, B. Matthew & Huberman, A.Michael, *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992

Matsumoto, David. *Culture and psychology*, California: Brooks Cole Publishing Copany, 1996

Maulia D. Kembara, M.Pd, *Panduan Lengkap Homeschooling*, Syanil Cipta Media, Bandung, 2007

Mulyadi, Seto, *Anak ku, sahabat, dan guruku (Catatan kecil keluarga muda)*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 1997

Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*, Jakarta:Bumi Aksara, 2011

Michele Anne Clark, *Trafficking in Person:an Issue of Human Security, Journal of Human Development* vol.4 No.2, 2003

Nana Syaodih S, *Bimbingan dan Konseling Dalam Praktek*. Bandung : Maestro, 2007

Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Nissa Ardilla, *Jurnal Kriminologi Indonesia: Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Kriminologi Fisip Universitas Indonesia, 2009

Olweus Bullying Prevention Program, hazelden.Com,
Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2013

Peter L.Berger, *Humanisme Sosiologi*, Jakarta : Inti Sari Aksara, dan Peter L.Berger dan Hansfried Keller, *Sosiologi Ditafsirkan kembali*, Jakarta: LP3ES, 1985

Andy Yentriyani, Politik perdagangan perempuan(Yogyakarta:Galang Press, 2004

Pustaka Bani Quraisy Jakarta Post, *Bullying di Sekolah*.
<http://www.thejakartapost.com>, 16 Desember,2007

Ratna Djuwita, *Bullying: Kekerasan Terselubung di Sekolah*. <http://www.anakku.net>, 16 Desember 2007.

Sarie Fabriane, *Cermin Masyarakat yang Frustrasi*.
<http://www.kompas.com>, 16 Desember 2007.

Sytarlinah Sukaji, *Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah*. Depok: L.P.S.P3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2000

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana. 2010.

Suleeman, E, *Gender Roles Streotypes and Education*, dalam S.Van Bemmelen, A. Habsjah, Jakarta:Kelompok perempuan pejuang perempuan tertindas, 2000

Talizuduhu Ndraha, *Research, Teori, Metodologi, Admainistrasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1981

UNESCO, *Open File on Inclusive Education*. Support Materials for Managers andAdministrators, 2002

Wilson G. T and O'Leary K. D, . *Principles of Behavior Therapy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

TENTANG PENULIS

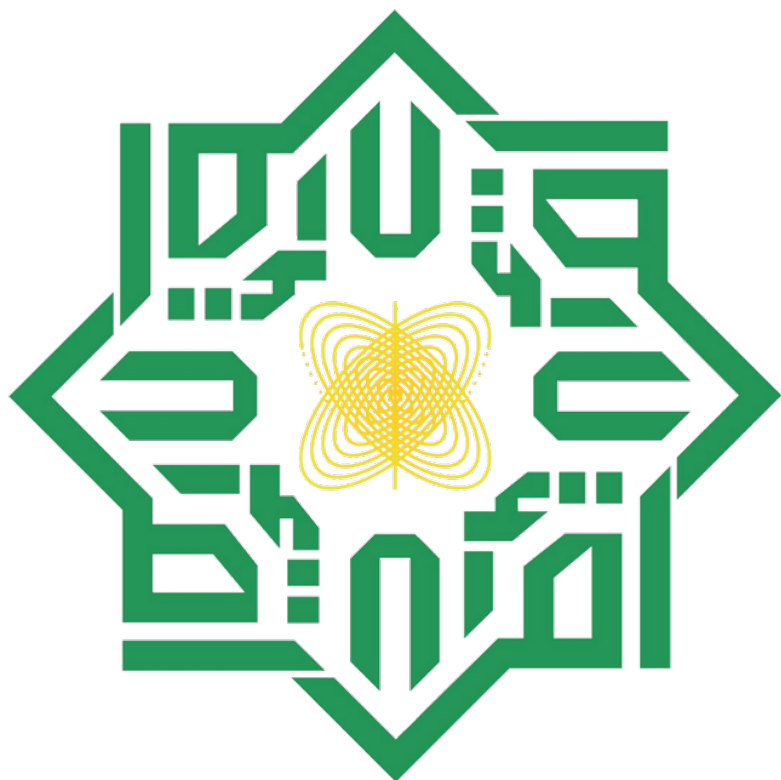
Dr. Zaitun, M. Ag., dilahirkan di Teluk Nilap, 10 Mei 1972. Menamatkan SD pada tahun 1985, penulis melanjutkan studinya di MTs Muallimin Yayasan Haji Abdullah Rantau panjang Kiri Kubu tahun 1988. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Modern KH. Dahlan Sipirok Tapanuli Selatan. Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan S1 di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dan melanjutkan ke Program Pasca Sarjana di Universitas yang sama, tamat tahun 2003. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan S3 nya di IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Pendidikan Islam dan mendapatkan gelar Doktor.

Pada saat ini, penulis mengajar di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan juga di Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau. Di samping menjadi tenaga pengajar, penulis juga sebagai ketua jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tidak hanya aktif dalam pengajaran, penulis juga aktif di organisasi seperti : DPD Al-Hidayah Prov Riau dan Himpaudi Prov Riau.

Hingga saat ini, penulis sudah banyak menulis jurnal, melaksanakan riset, dan menulis buku yang berkeaan dengan pendidikan.

Dra. Hj. Ilmiati, M. Ag., lahir di Pekanbaru, 13 Maret 1970. Masuk SDN 005 Pekanbaru, tamat tahun 1983. Pada tahun 1986, penulis menamatkan pendidikan tingkat pertama di MTsN Pekanbaru dan melanjutkan ke MAN I Pekanbaru. Setelah tamat pada tahun 1989, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi (S1) IAIN SUSQA Pekanbaru dan tamat pada tahun 1994. Setelah itu penulis melanjutkan studinya ke jenjang S2 dan mendapatkan gelar M. Ag di IAIAN Sunan Kalijaga tahun 1997. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studinya jenjang S3 di Imam Bonjol Padang.

Penulis adalah tenaga pengajar di jurusan Bahasa Arab UIN Suska Riau dan sekarang juga menjadi Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sultan Syarif Kasim
PEKANBARU – RIAU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sultan Syarif Kasim
PEKANBARU - RIAU

ISBN 976-602-70159-9

